



## BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 116 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;
- b. bahwa Klasifikasi Arsip sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) .
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaga Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Tahun 2020);
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 48).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi .
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pencipta Arsip.
6. Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam

9. kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.
14. Arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
15. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
16. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengolah seluruh arsip aktif yang tercipta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilingkungannya.
18. Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan yang berkedudukan pada cabang dinas, balai, atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
19. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.
20. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
21. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip.
22. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan pelayanan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
23. Akuisisi Arsip Statis adalah proses adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas melalui verifikasi langsung dan/atau tidak langsung.

24. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disebut DPA adalah daftar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang berisikan arsip yang tidak ditemukan pada saat verifikasi.

BAB II  
Bagian Kesatu MAKSUD  
DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Pedoman Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman arsip yang menjadi pengenalan urusan dalam bentuk alfa nomorek yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.

BAB III  
Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip dan  
Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip  
Bagian Kesatu  
Klasifikasi  
Arsip Pasal 4

- (1) Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dikelompokkan ke dalam klasifikasi arsip berdasarkan:
  - a. Fungsi dan/atau Urusan;
  - b. Kegiatan; dan
  - c. Transaksi.
- (2) Pengelompokan arsip berdasarkan klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kode Klasifikasi Arsip  
Pasal 5

- (1) Kode klasifikasi menggunakan kombinasi huruf dan angka.

- (2) Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menggambarkan urusan.
- (3) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada masing-masing urusan.

#### Pasal 6

Pengaturan Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip

#### Pasal 7

- (1) Setiap arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifikasi berdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya.
- (2) Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pemberkasan, pembuatan daftar arsip aktif, inaktif, statis, dan pembuatan daftar arsip usul pindah, usul serah, dan usul musnah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara efektif terhitung 12 bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 7 Desember 2020

BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 7 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 117

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 116 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 DESEMBER 2020

TENTANG : PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI.

A. Urusan dan Susunan Pola Klasifikasi:

Fasilitatif:

PR	Perencanaan. (Hal 7 – 9)
HK	Hukum (Hal 9 – 11)
KP	Kepegawaian (Hal 11 – 17)
OR	Organisasi (Hal 18)
KU	Keuangan (Hal 18 – 24)
PL	Perlengkapan (Hal 24 – 25)
RT	Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan (Hal 25 – 27)
<del>PA</del> / PG	Pengadaan (Hal 27 – 28)
HM	Hubungan Masyarakat (Hal 28 – 30)
DL	Diklat (Hal 30 – 32)
KA	Kearsipan (Hal 32 – 34)
PS	Perpustakaan (Hal 34 – 36)

Substantif:

DK	Pendidikan (Hal 36 – 40)
BD	Kebudayaan (Hal 40 – 44)
<del>PD</del> / PO	Kepemudaan dan Olah Raga (Hal 44 – 47)
PE	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Hal 47 – 50)
<del>PM</del> / PN	Penanaman Modal (Hal 50 – 52)
PD	Perdagangan (Hal 52 – 56)
PI	Perindustrian (Hal 56 – 61)
UK	Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) (Hal 61 – 65) TK
	Ketenagakerjaan (Hal 66 – 70)
PM	Pemerintahan (Hal 70 – 76)
<del>PD</del> / KD	Kependudukan dan Keluarga Berencana (Hal 76 – 78)
PA	<del>Pekerjaan Umum</del> Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Hal 78 – 79)
PT	Pertanian (Hal 79 – 86)
PK	Perikanan (Hal 86 – 88)
PS	Persandian (Hal 88 – 89)
ST	Statistik (Hal 90 – 92)
BC	Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya (Hal 92 – 94) SO
	Sosial (Hal 94 – 97)
KS	Kesehatan (Hal 97 – 105)
KI	Komunikasi dan Informatika (Hal 106 – 111)
PH	Perhubungan (Hal 111 – 114)
LH	Lingkungan Hidup (Hal 114 – 118)
PU	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Hal 118 – 122) KK
	Keamanan dan Ketertiban (Hal 122 – 124)
LB	Penelitian dan Pengembangan (Hal 124 – 127)

B. Perincian Kode Klasifikasi dan Indeks Kaitan

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS ARSIP	URAIAN
PR	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
PR.01	Penyusunan Rencana Pembangunan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan mulai dari Pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan dan penyusunan bahan, Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan, hingga penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
PR.02	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	
02.01	Musrenbang Kabupaten	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten.
<del>02.01</del> / 02.02	Musrenbang Kecamatan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
PR.03	Perencanaan Pembangunan Daerah	
03.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Renstra	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja/ pembangunan menengah/rencana strategis.
03.02	Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja/ pembangunan tahunan.
03.03	Penyusunan Program Kerja Tahunan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan program kerja daerah tahunan mulai dari penerimaan usulan program kerja dari unit kerja, OPD, hingga penyusunan program kerja tahunan pemerintah kabupaten.
PR.04	Penyusunan Kontrak Kinerja	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan kontrak kinerja meliputi kontrak kinerja eselon IV, III hingga eselon II.
PR.05	Penyusunan Laporan	

05.01	Laporan Berkala	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, kinerja utama, dan akuntabilitas kinerja.
05.02	Laporan Insidental OPD/Kabupaten	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan laporan kegiatan insidental OPD dan kabupaten.
<b>PR.06</b>	<b>Evaluasi Program</b>	
06.01	Unit Kerja Setingkat Eselon IV dan III	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program kerja unit kerja setingkat eselon IV dan III.
06.02	Unit Kerja Setingkat Eselon II	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program kerja unit kerja setingkat eselon II.
06.03	Pemerintah Daerah Kabupaten	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program kerja pemerintah daerah kabupaten.
<b>PR.07</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
<b>PR.08</b>	<b>Konsultasi Perencanaan Pembangunan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan konsultasi penyusunan rencana pembangunan.
<b>PR.09</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring perencanaan pembangunan mulai dari pemantauan, evaluasi, penilaian hingga pelaporan.
<b>PR.10</b>	<b>Penyusunan Rencana Aksi Strategis Daerah</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rencana aksi strategis daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, rapat pembahasan, sosialisasi hingga penetapan rencana aksi strategis daerah.
<b>PR.11</b>	<b>Perencanaan Pendanaan Pembangunan</b>	
11.01	Pendanaan Luar Negeri dan Hibah	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan luar negeri dan hibah.
11.02	Pendanaan Dalam Negeri	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan dalam negeri.
11.03	Kerja Sama Pembangunan Internasional	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan kerja sama pembangunan internasional.
11.04	Pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan surat berharga syariah negara.



11.05	Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan on top atau inisiatif baru.
HK	HUKUM	
HK.01	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari penyampaian usulan/prakarsa peraturan perundang-undangan sampai dengan penyusunan program legislasi pemerintah daerah.
HK.02	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	
02.01	Penyusunan Peraturan Daerah	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan, perumusan dan penyusunan bahan, pemberian masukan/pembahasan sampai dengan pengundangan dan penetapan
02.02	Penyusunan Keputusan/Penetapan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan keputusan/penetapan mulai dari pengajuan draf, telaah hukum, perbaikan draf sampai dengan penetapan keputusan/penetapan
HK.03	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan sosialisasi/penyuluhan/diseminasi peraturan perundang-undangan penyebarluasan peraturan perundang-undangan
HK.04	Penyusunan Naskah Kerja Sama	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan naskah kerja sama mulai dari penyampaian usul prakarsa, konsultasi/koordinasi, penyusunan draf awal, peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/pemarafan, penyusunan draf final sampai dengan pengesahan
HK.05	Pengelolaan Dokumentasi Hukum	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi produk hukum

HK.06	Penyusunan Uji Materi Peraturan Perundang-undangan/Opini Hukum	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan uji materi peraturan perundang-undangan atau pemberian opini hukum mulai dari pengajuan permohonan, pendaftaran, penjadwalan sidang sampai dengan pembuatan putusan
HK.07	Pemberian Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sanggah	
07.01	Bantuan/Konsultasi Hukum Pidana	Arsip yang berkaitan dengan pemberian bantuan/konsultasi hukum pidana
07.02	Bantuan/Konsultasi Hukum Perdata	Arsip yang berkaitan dengan pemberian bantuan/konsultasi hukum perdata
07.03	Bantuan/Konsultasi Hukum PTUN dan Agama	Arsip yang berkaitan dengan pemberian bantuan/konsultasi hukum PTUN dan agama
HK.08	Penanganan Permasalahan Hukum	Arsip yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum antara lain meliputi penanganan masalah kontrak dan penanganan permasalahan hukum dengan keterangan ahli
KP	KEPEGAWAIAN	
KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
01.01	Perencanaan Kebutuhan ASN	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan ASN terdiri dari bahan penyusunan rencana kebutuhan, hasil analisis kebutuhan ASN ataupun PPPK dan dokumen pengolahan data kebutuhan
01.02	Perencanaan Pertimbangan Formasi	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan pertimbangan formasi meliputi pertimbangan teknis penetapan formasi ASN dan formasi ikatan dinas

01.03	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Arsip yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara
01.04	Standarisasi Jabatan	Arsip yang berkaitan dengan standarisasi jabatan yang terdiri dari informasi jabatan, kompetensi jabatan dan klasifikasi jabatan
<b>KP.02</b>	<b>Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai</b>	
02.01	Penyusunan Formasi ASN	Arsip yang berkaitan dengan formasi ASN meliputi usulan formasi, usulan permintaan formasi ke Menpan RB dan Kepala BKN, persetujuan formasi, penetapan formasi, dan penetapan formasi khusus
02.02	Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Arsip yang berkaitan dengan pengadaan ASN meliputi hasil kegiatan proses rekrutmen ASN, penetapan pengumuman kelulusan, berkas lamaran yang tidak diterima, nota usul pengangkatan ASN, open bidding (seleksi terbuka jabatan)
02.03	Penyusunan Sistem Rekrutmen ASN	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan sistem rekrutmen ASN mulai dari pengelolaan sistem rekrutmen, fasilitasi penyelenggaraan seleksi sampai dengan sertifikasi dan pelaporan
<b>KP.03</b>	<b>Mutasi Pegawai</b>	
03.01	Alih Status/Pindah Instansi	Arsip yang berkaitan dengan mutasi pegawai meliputi usulan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, hingga persetujuan/pertimbangan Kepala BKN
03.02	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Arsip yang berkaitan dengan usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan
03.03	Pengangkatan dan Pemberhentian	Arsip yang berkaitan dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional

03.04	Penetapan Perubahan Data Pegawai	Arsip yang berkaitan dengan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan, hukum pegawai
03.05	Peninjauan Masa Kerja	Arsip yang berkaitan dengan usulan peninjauan masa kerja
03.06	Pelaksanaan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Arsip yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat
<b>KP.04</b>	<b>Pengembangan Karir</b>	
04.01	Pelaksanaan Pendidikan Formal	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan karir melalui pendidikan informal meliputi penyusunan rencana dan analisis kebutuhan, penerimaan usulan diklat/kursus/magang/ujian dinas/praktek kerja di instansi lain sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan.
04.02	Pelaksanaan Pendidikan Informal	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan karir melalui pendidikan formal meliputi penyusunan rencana dan analisis kebutuhan, penerimaan usulan tugas belajar/izin belajar/ sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan pendidikan
04.03	Penyesuaian Ijazah	Arsip yang berkaitan dengan usulan penyesuaian ijazah
04.04	Penyusunan Sistem Karier	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan sistem karir
04.05	Pengajuan Angka Kredit	Arsip yang berkaitan dengan penilaian angka kredit mulai dari pengajuan daftar usul penetapan angka kredit sampai dengan penetapan angka kredit
<b>KP.05</b>	<b>Penilaian Kinerja</b>	

05.01	Penyusunan Sistem Penilaian dan Standar Kinerja	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan sistem penilaian dan standar kerja meliputi sistem penilaian kinerja ASN, standar kinerja jabatan pegawai ASN hingga penilaian kinerja pegawai ASN
05.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN meliputi hasil pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN, analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN, dan teknis penilaian kinerja ASN
05.03	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja	Arsip yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN
<b>KP.06</b>	<b>Pembinaan Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN</b>	
06.01	Kode Etik Pegawai	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kode etik pegawai
06.02	Disiplin Pegawai	Arsip yang berkaitan dengan penegakan disiplin dan peningkatan disiplin
06.03	Pemberhentian	Arsip yang berkaitan dengan pemberhentian dengan hormat, tidak hormat maupun pemberhentian sementara
06.04	Pensiun	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan pensiun pegawai meliputi administrasi pengajuan pensiun hingga penetapan pensiun.
<b>KP.07</b>	<b>Pemberian Bantuan Hukum</b>	Arsip yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum pegawai
<b>KP.08</b>	<b>Pengelolaan Status dan Kedudukan Pegawai</b>	
08.01	Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan pertimbangan status pegawai meliputi analisis status kepegawaian dan penyusunan pertimbangan status kepegawaian
08.02	Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan dan analisis pertimbangan kedudukan pegawai
08.03	Penyelesaian Keberatan Pegawai	Arsip yang berkaitan dengan penyelesaian keberatan

		pegawai
08.04	Penyelesaian Perselisihan/sengketa kepegawaian	Arsip yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan/sengketa kepegawaian
<b>KP.09</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	
09.01	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi kepegawaian
09.02	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi kepegawaian
09.03	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian
<b>KP.10</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian</b>	
10.01	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap formasi, pengadaan dan pasca diklat mulai dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan penyusunan rekomendasi, dan pelaporan
10.02	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian mulai dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan rekomendasi, dan pelaporan
10.03	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Arsip yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja mulai dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan rekomendasi, dan pelaporan
10.04	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN mulai dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan rekomendasi dan pelaporan
10.05	Pelaporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan hasil Pengawasan dan pengendalian kepegawaian

10.06	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer
<b>KP.11</b>	<b>Administrasi Pegawai</b>	
11.01	Administrasi Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
11.02	Administrasi Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan
11.03	Administrasi Cuti Alasan Penting	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi cuti alasan penting
11.04	Administrasi Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara
11.05	Dokumentasi Identitas Pegawai	Arsip yang berkaitan dengan dokumentasi identitas pegawai meliputi pengusulan penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, dan pelaporan pajak penghasilan pribadi (LP2P)
11.06	Pengurusan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
11.07	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan
<b>KP.12</b>	<b>Layanan Kesejahteraan Pegawai</b>	
12.01	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan pemeliharaan kesehatan pegawai
12.02	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan asuransi pegawai
12.03	Layanan Tabungan Perumahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan tabungan perumahan
12.04	Layanan Bantuan Sosial	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan bantuan sosial
12.05	Layanan Pemberian Pakaian Dinas	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pakainya dinas

12.06	Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian santunan pegawai yang meninggal karena dinas
12.07	Pemberian Tali Kasih	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian tali kasih
12.08	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa pegawai
12.09	Layanan Olahraga dan Rekreasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan olahraga dan rekreasi
12.10	Layanan Medical Cek Up	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan medical cek up
<b>KP.13</b>	<b>Administrasi Perseorangan</b>	
13.01	Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari berkas lamaran sampai dengan pensiun
13.02	Berkas Perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Arsip yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
13.03	Berkas Perseorangan Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disetarakan	Arsip yang berkaitan dengan berkas perseorangan pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetarakan meliputi bupati dan wakil bupati, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD, ketua, wakil ketua, dan anggota KPUD/ Bawaslu
13.04	Berkas Perseorangan Kepala Desa	Arsip yang berkaitan dengan berkas perseorangan kepala desa
<b>KP.14</b>	<b>Penilaian Kompetensi</b>	
14.01	Penilaian Kompetensi	Arsip yang berkaitan dengan penilaian kompetensi pegawai
14.02	Pengelolaan Hasil Penilaian Kompetensi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan hasil penilaian kompetensi pegawai
<b>OR</b>	<b>ORGANISASI</b>	

OR.01	<b>Analisis Struktur Organisasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan analisis struktur organisasi meliputi pembentukan organisasi, perubahan organisasi, dan pembubaran organisasi.
OR.02	<b>Analisis Uraian Jabatan dan Tata Kerja</b>	Arsip yang berkaitan dengan analisis uraian jabatan dan tata kerja meliputi penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja, analisis jabatan/analisis manajemen.
OR.03	<b>Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional meliputi penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural.
OR.04	<b>Analisis Tata Laksana</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan analisis tata laksana meliputi prosedur tetap dan mekanisme kerja.
OR.05	<b>Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi organisasi dan tata laksana meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, uraian jabatan serta tata laksana.
KU	<b>KEUANGAN</b>	
KU.01	<b>Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)</b>	
01.01	<b>Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)</b>	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) meliputi kebijakan umum, renstra, strategi dan prioritas, dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama DPRD, KUA beserta nota kesepakatannya, dokumen rencana PPAS, nota kesepakatan PPA dan Prioritas Plafon Anggaran.

01.02	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah (RKA-SKPD/PD)	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah (RKA-SKPD/PD) meliputi dokumen penyusunan RKA-PD yang telah disetujui Sekda dan dokumen RKA-SKPD/PD.
01.03	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Arsip yang berkaitan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi pengantar nota keuangan pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD, hasil pembahasan RAPBD oleh DPRD dan pemerintah daerah, dokumen rancangan penjabaran APBD beserta lampirannya, penyampaian permohonan evaluasi kepada gubernur tentang RAPBD dan penjabarannya, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD, penetapan Perda APBD oleh gubernur beserta penjabarannya, dan PERDA tentang APBD.
01.04	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD-P mulai dari penyusunan prioritas plafon anggaran perubahan, rencana kerja anggaran/(RKA-SKPD/OPD) Perubahan.
<b>KU.02</b>	<b>Penyusunan Anggaran</b>	
02.01	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Arsip yang berkaitan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.
02.02	Musyawarah Rencana Pembangunan( Musrenbang) Kabupaten	Arsip yang berkaitan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten.
02.03	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD/OPD	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD/OPD mulai dari penyusunan rancangan sampai dengan persetujuan oleh sekretaris daerah sampai dengan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
<b>KU.03</b>	<b>Pelaksanaan Anggaran</b>	

03.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, setoran pajak, sisa lebih perhitungan anggaran, barang milik daerah, piutang daerah serta investasi daerah.
03.02	Pelaksanaan Belanja	Arsip yang berkaitan dengan belanja terdiri dari dokumen belanja langsung dan dokumen belanja tidak langsung.
03.03	Pelaksanaan Pembiayaan Daerah	Arsip yang berkaitan dengan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
03.04	Penatausahaan Keuangan	Arsip yang berkaitan dengan dokumen penatausahaan keuangan baik dengan pengajuan secara UP, GU, TU, LS terdiri dari Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
03.05	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Arsip yang berkaitan dengan Berkas Pertanggungjawaban Pengguna Dana terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), ringkasan perincian pengeluaran objek, rekening koran bank, laporan pertanggungjawaban fungsional dan administrasi, bukti penyetoran pajak, register penutupan kas, berita acara pemeriksaan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Termasuk Arsip Data Komputer (ADK), laporan pendapatan negara/daerah, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulan/semesteran.
03.06	Penatausahaan Gaji	Arsip yang berkaitan dengan penatausahaan gaji pegawai.
03.07	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Keuangan tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
<b>KU.04</b>	<b>Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri</b>	
04.01	Pengajuan Pinjaman Hibah Luar Negeri	Arsip yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman/hibah luar negeri.



04.02	Penarikan dan Penggunaan Pinjaman.Hibah Luar Negeri	Arsip yang berkaitan dengan penarikan dan penggunaan hibah luar negeri meliputi alokasi penggunaan, penarikan dana, realisasi pencairan sampai dengan permintaan penarikan.
04.03	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
04.04	Pelaporan	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
<b>KU.05</b>	<b>Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari penyusunan manual impelemntasi samapi dengan pengelolaan data komputer dan penyusunan berita acara rekonsiliasi untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca bulanan/triwulan/semesteran.
<b>KU.06</b>	<b>Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan</b>	
06.01	Penetapan penugasan penyaluran anggaran	Arsip yang berkaitan dengan penetapan penugasan penyaluran anggaran mulai dari penetapan pimpinan proyek sampai dengan keputusan pembukaan rekening.
06.02	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	Arsip yang berkaitan dengan Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan.
06.03	Pembukuan anggaran	Arsip yang berakaitan dengan Pembukuan anggaran terdiri dari Pembukuan anggaran terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran.
<b>KU.07</b>	<b>Pengelolaan Aanggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD</b>	

07.01	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pilkada dan biaya bantuan pemilu dari APBD terdiri dari kebijakan keuangan pilkada dan penyusunan anggaran bantuan pemilu, peraturan/pedoman/standar belanja pegawai, barang dan jasa, operasional dan kontingensi untuk biaya pilkada dan bantuan pemilu, bahan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pilkada KPUD dan Bawalu Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan permohonan pengajuan RKA KPUD dan Panwas/Bawaslu, berkas pembahasan RKA pilkada dan bantuan pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pilkada dan bantuan pemilu kabupaten, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) pilkada KPUD dan Panwas/Bawaslu Kabupaten dan bantuan biaya pemilu dari APBD, berkas pembentukan dana cadangan pilkada, bahan rapat rancangan peraturan daerah tentang pilkada, dan bantuan biaya pemilu dari APBD, dan nota persetujuan DPRD tentang perda APBD pilkada dan bantuan biaya pemilu dari APBD.
07.02	Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pilkada dan anggaran biaya bantuan pemilu.
07.03	Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran operasional pemilu meliputi penyediaan pembiayaan kegiatan dan penyaluran biaya pemilu.
<b>KU.08</b>	<b>Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Desa</b>	
08.01	Penyusunan Rencana Anggaran Desa	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan program dan rencana anggaran pemerintahan desa.
08.02	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran desa meliputi pungutan desa, pelepasan eks tanah desa, sewa tanah kas desa, pendapatan asli desa hingga pembukuan kas desa.

08.03	Pelaporan	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa.
<b>KU.09</b>	<b>Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah</b>	
09.01	Penyusunan Rencana Pengawasan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana pengawasan keuangan daerah meliputi penyusunan Rencana Strategis Pengawasan, Rencana Kerja Pengawasan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan, Penetapan Kinerja Tahunan Pengawasan, dan Rakor Pengawasan.
09.02	Pelaksanaan Pengawasan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan audit, pengawasan, reuiu, evaluasi, pemaantauan/monitoring dan bimbingan teknis/konsultasi/asistensi/sosialisasi.
09.03	Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan	Arsip yang berkaitan dengan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan.
<b>PL</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>	
<b>PL.01</b>	<b>Pengelolaan Barang</b>	
01.01	Inventarisasi Barang	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak.
01.02	Distribusi Barang	Arsip yang berkaitan dengan pendistribusian barang habis pakai, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
01.03	Pemeliharaan Barang	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan barang meliputi pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, serta balik nama barang.

01.04	Administrasi Pergudangan	Arsip terkait dengan administrasi pergudangan meliputi pencatatan pergudangan, pengelolaan gudang persediaan, dan pelaporan mutasi barang.
<b>PL.02</b>	<b>Pengelolaan Aset</b>	
02.01	Pengelolaan Bukti Kepemilikan Aset	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan bukti kepemilikan aset meliputi bukti-bukti kepemilikan gedung/bangunan antara lain sertifikat tanah, izin bangunan, rancang bangun gedung, silsilah riwayat bangunan, cara perolehan pengalihan kepemilikan dan bukti-bukti kepemilikan barang bergerak seperti kendaraan dinas, barang inventaris, dan barang bergerak lainnya.
02.02	Penghapusan aset	Arsip yang berkaitan dengan penghapusan aset meliputi penjualan, pemindahtanganan, tukar guling, hibah gedung bangunan, dan kelengkapan persyaratan.
<b>RT</b>	<b>KERUMAHTANGGAAN DAN KETATAUSAHAAN</b>	
RT.01	Pengurusan Administrasi Telekomunikasi	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan administrasi telekomunikasi meliputi penggunaan/peralatan telepon, radio, teleks, TV kabel, dan internet.
RT.02	Pengurusan Perjalanan Dinas	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri (surat perintah, visa, passport, tiket, laporan, SPD, dll.).
RT.03	Pengelolaan Fasilitas Kantor	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas kantor meliputi sarana dan prasarana .
RT.04	Penyelenggaraan Rapat	Arsip yang berkaitan penyelenggaraan rapat pimpinan dan rapat staf.

RT.05	<b>Pengelolaan Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan penyediaan konsumsi dan akomodasi.
RT.06	<b>Pengurusan Kendaraan Dinas</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan kendaraan dinas meliputi pengurusan surat-surat kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan, pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan.
RT.07	<b>Pemeliharaan Gedung dan Taman</b>	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung, pertamanan/landscaping, penghijauan taman, perbaikan gedung, perbaikan rumah dinas/wisma, serta kebersihan gedung dan taman.
RT.08	<b>Pengelolaan Jaringan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan meliputi perbaikan/pemeliharaan serta pemasangan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer.
RT.09	<b>Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan ketertiban dan keamanan meliputi pelaksanaan pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas, daftar piket, surat ijin keluar masuk orang, sampai dengan pelaporan.
RT.10	<b>Administrasi Pengelolaan Parkir</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perparkiran gedung/kantor/rumah dinas.
RT.11	<b>Administrasi Pakaian Dinas</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan pendistribusian pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya.
PA	<b>PENGADAAN</b>	
PA.01	<b>Penyusunan Rencana Umum Pengadaan</b>	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana umum pengadaan mulai dari identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana anggaran, penetapan kebijakan umum, penyusunan KAK, sampai dengan pengumuman rencana umum pengadaan.

<b>PA.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengadaan</b>	
02.01	Pemilihan Penyedia	Arsip yang berkaitan dengan pemilihan penyedia mulai dari persiapan sampai dengan pemilihan penyedia pengadaan.
02.02	Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak	Arsip yang berkaitan dengan penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pengadaan.
02.03	Pelaksanaan Swakelola	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan swakelola mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi.
<b>PA.03</b>	<b>Pengembangan Strategi dan Sistem Pengadaan</b>	
03.01	Pengembangan Strategi Pengadaan Umum	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan strategi pengadaan umum meliputi pengadaan barang/jasa dan pekerjaan konstruksi.
03.02	Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus	Arsip yang berkaitan dengan strategi pengadaan khusus meliputi kemitraan pemerintah dengan badan usaha serta badan usaha dan keadaan khusus.
03.03	Pengembangan Sistem Katalog	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem katalog mulai dari riset dan kontrak, pengendalian pelaksanaan katalog sampai dengan evaluasi katalog.
03.04	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik meliputi pengembangan aplikasi dan teknologi informasi serta pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik.
<b>PA.04</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengadaan</b>	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan serta kinerja pelaksanaan pengadaan.
<b>HM</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	
<b>HM.01</b>	<b>Penyelenggaraan Keprotokolan</b>	

01.01	Penyelenggaraan Acara Kedinasan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara kedinasan antara lain upacara kedinasan, acara pelatihan, acara peresmian, acara jamuan tamu, dan acara peringatan hari-hari besar.
01.02	Penyelenggaraan Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kunjungan dinas dalam negeri dan luar negeri meliputi kunjungan dinas pimpinan lembaga.
01.03	Penyusunan Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	Arsip yang berkaitan dengan agenda kegiatan pimpinan daerah antara lain: jadwal pimpinan, jadwal tamu pimpinan.
<b>HM.02</b>	<b>Dokumentasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media antara lain kertas/foto/video/rekaman suara/multi media.
<b>HM.03</b>	<b>Penyajian Informasi Kelembagaan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan mulai dari kliping koran, brosur/leaflet/poster/plakat, pengumuman/pemberitahuan.
<b>HM.04</b>	<b>Hubungan Antar lembaga dan Pemerintah Daerah</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dan pemerintah daerah meliputi hubungan antar lembaga pemerintah, hubungan dengan organisasi sosial/LSM, hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL), forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas).
04.01	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga pemerintah.
04.02	Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan organisasi sosial/LSM.
04.03	Hubungan dengan Perusahaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perusahaan.
04.04	Hubungan dengan Perguruan Tinggi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL).



04.05	Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas).
04.06	Hubungan dengan Media Massa	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan media massa meliputi siaran pers/konferensi pers/press relaase, kunjungan wartawan/peliputan, dan wawancara.
HM.05	Rapat Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPRD Kabupaten	Arsip yang berkaitan dengan rapat dengar pendapat/hearing DPRD kabupaten meliputi bahan/materi pidato/sidang DPRD serta Muspida kabupaten.
HM.06	Publikasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan publikasi meliputi penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal, publikasi melalui media cetak maupun elektronik, pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan, dan pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan/upacara.
06.01	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan publikasi antara lain penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal
06.02	Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan publikasi melalui media cetak maupun elektronik.
06.03	Pameran/ Sayembara/ Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan publikasi antara lain pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan.
HM.07	Pemberian Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan/Ucapan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan/tanda kenag-kenagan/ upacara antara lain piagam penghargaan, sertifikat, piala dll.
DL	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
DL.01	<b>Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat</b>	
01.01	Penyusunan Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan.
01.02	Akreditasi	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan meliputi akreditasi institusi penilai dan akreditasi program/institusi yang dinilai.

01.02 / 01.03	Kurikulum dan Modul	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum dan modul.
01.03 / 01.04	Sistem Informasi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi pengembangan program dan pembinaan diklat.
01.04 / 01.05	Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pengembangan program dan pembinaan diklat.
01.05 / 01.06	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi program dan pembinaan diklat.
<b>DL.02</b>	<b>Pembinaan Widyaiswara</b>	
02.01	Seleksi dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan seleksi dan pengembangan wisyaiswara.
02.02	Sertifikasi	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi widyaiswara.
02.03	Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pengembangan program dan pembinaan widyaiswara.
02.04	Penilaian	Arsip yang berkaitan dengan penilaian widyaiswara.
02.05	Konsultasi, Advokasi dan Asistensi	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi widyaiswara.
02.06	Sistem Informasi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi widyaiswara.
<b>DL.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	
03.01	Perencanaan	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan diklat meliputi perencanaan peserta, pengajar dan penjadwalan diklat.
03.02	Penyelenggaraan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat.
03.03	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi penyelenggaraan diklat.
03.04	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran.
03.05	Sistem Informasi Diklat	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan diklat.

03.06	Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat dan pasca diklat.
03.09	Pengelolaan Data Alumni	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data alumni diklat.
<b>DL.04</b>	<b>Pelaporan Statistik Penyelenggaraan Diklat</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
<b>KA</b>	<b>KEARSIPAN</b>	
<b>KA.01</b>	<b>Pembinaan Kearsipan</b>	
01.01	Akreditasi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan akreditasi kearsipan daerah mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan sertifikat akreditasi.
01.02	Sertifikasi Arsiparis	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi arsiparis mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan daftar pemegang sertifikat.
01.03	Bina Arsiparis	arsip yang berkaitan dengan pembinaan profesi arsiparis meliputi penentuan formasi jabatan arsiparis sampai dengan penetapan standar kompetensi arsiparis, bimbingan konsultasi, pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), sampai dengan berkas Penetapan Angka Kredit (PAK) Arsiparis dan apresiasi arsiparis melalui pemilihan arsiparis teladan.
01.04	Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan	Arsip yang berkaitan dengan bimbingan dan konsultasi penerapan sistem kearsipan (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip), penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, unit kearsipan, dan sumberdaya manusia kearsipan.
01.05	Supervisi dan Evaluasi Kearsipan	Arsip yang berkaitan dengan supervisi dan evaluasi implementasi pengelolaan kearsipan.
01.06	Pengelolaan Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan database bimbingan, konsultasi dan supervisi kearsipan.
01.07	Fasilitasi Kearsipan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi kearsipan.

01.08	Penilaian Organisasi Kearsipan (LKD/Unit Kearsipan) Teladan	Arsip yang berkaitan dengan penilaian organisasi kearsipan (LKD/unit kearsipan) teladan mulai dari penyelenggaraan sampai dengan penetapan/penghargaan organisasi kearsipan teladan.
01.09	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Arsip yang berkaitan dengan jadwal retensi arsip mulai dari pengusulan dan persetujuan jadwal retensi arsip sampai dengan database pengusulan dan persetujuan jadwal retensi arsip.
<b>KA.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>	
02.01	Penciptaan Arsip	Arsip yang berkaitan dengan proses penciptaan arsip mulai dari pencatatan sampai dengan pendistribusian.
02.02	Penggunaan Arsip	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan arsip mulai dari pengklasifikasian pengamanan dan akses arsip sampai dengan data peminjaman arsip.
02.03	Pemeliharaan Arsip Dinamis	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan arsip dinamis mulai dari pemberkasan, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, alih media serta penentuan program arsip vital.
02.04	Autentikasi Arsip Dinamis	Arsip yang berkaitan dengan autentikasi arsip dinamis yang terdiri dari pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian dan penetapan autentisitas arsip.
02.05	Penyusutan Arsip	Arsip yang berkaitan dengan penyusutan arsip meliputi kegiatan pemindahan arsip inaktif ke record center, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis.
KA.02.06	Pengelolaan Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan database pengelolaan arsip dinamis baik pengelolaan arsip aktif maupun inaktif.
<b>KA.03</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis</b>	
03.01	Akuisisi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan akuisisi arsip mulai dari monitoring fisik dan daftar arsip, verifikasi terhadap daftar arsip, menetapkan status arsip statis, persetujuan untuk penyerahan, penetapan arsip yang diserahkan, berita acara penyerahan arsip sampai dengan daftar arsip

		yang diserahkan.
03.02	Pengumpulan Sejarah Lisan	Arsip yang berkaitan dengan sejarah lisan meliputi administrasi pelaksanaan sejarah lisan dan hasil wawancara sejarah lisan.
03.03	Pencarian Arsip Statis	Arsip yang berkaitan dengan daftar pencarian arsip statis mulai dari pengumuman sampai dengan akuisisi daftar pencarian arsip statis.
03.04	Pengolahan Arsip	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan arsip statis mulai dari menata informasi, fisik, sampai dengan menyusun sarana bantu temu balik.
03.05	Preservasi Arsip	Arsip yang berhubungan dengan preservasi arsip baik secara preventif maupun kuratif serta laporan hasil pengujian mutu preservasi.
03.06	Autentikasi Arsip Statis	Arsip yang berkaitan dengan autentikasi arsip statis terdiri dari pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian dan penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan.
03.07	Layanan Akses Arsip Statis	Arsip yang berkaitan dengan akses arsip statis meliputi layanan arsip, penerbitan naskah sumber/sumber sejarah, dan pameran arsip.
<b>KA.04</b>	<b>Pengelolaan JIKN dan SIKN</b>	Arsip yang berkaitan pengelolaan jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) dan sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) berupa database arsip daerah yang masuk simpul JIKN maupun SIKN.
<b>PS</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
<b>PS.01</b>	<b>Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi</b>	

01.01	Layanan Deposit Bahan Pustaka	Arsip yang berkaitan dengan layanan deposit bahan pustaka mulai dari serah simpan karya cetak dan karya rekam, pemantauan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, pembuatan bibliografi dan katalog pendaftaran nomor ISBN, sampai dengan pendaftaran nomor ISMN.
01.02	Pengembangan Koleksi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi pustaka melalui akuisisi koleksi perpustakaan, pembelian, hibah, hadiah, tukar menukar, implementasi undang-undang KCKR, terbitan internal, pendistribusian bahan pustaka surplus, ataupun inventarisasi koleksi (Buku Induk), pengolahan bahan pustaka serta pengelolaan pangkalan data katalog koleksi.
01.03	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Arsip yang berkaitan dengan layanan jasa perpustakaan dan informasi mulai dari keanggotan, sirkulasi, referensi, alih aksara, bahasa dan kajian naskah nusantara, kerja sama perpustakaan, pengembangan implementasi teknologi informasi perpustakaan, serta pangkalan data layanan perpustakaan.
01.04	Preservasi Bahan Pustaka	Arsip yang berkaitan dengan preservasi bahan pustaka meliputi konservasi, reprografi, transformasi digital, dan kurasi digital.
<b>PS.02</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan</b>	
02.01	Pengembangan Perpustakaan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan baik perpustakaan umum, khusus, maupun perpustakaan sekolah.
02.02	Akreditasi Perpustakaan	Arsip yang berkaitan dengan akreditasi perpustakaan mulai dari permintaan akreditasi sampai dengan pemberian akreditasi.
02.03	Pengelolaan Pangkalan Data Perpustakaan	Arsip yang berkaitan dengan pangkalan data perpustakaan meliputi nomor pokok perpustakaan dan data perpustakaan berbasis wilayah.
02.04	Penerbitan Jurnal (Master)	Arsip yang berkaitan dengan penerbitan jurnal (master).

PS.03	Pemasyarakatan Minat Baca	Arsip yang berkaitan dengan pemasyarakatan minat baca melalui organisasi perpustakaan berupa forum perpustakaan umum, khusus, dan sekolah, serta gerakan pemasyarakatan minat baca, dan organisasi perpustakaan lainnya.
PS.04	Pembinaan Pustakawan	
04.01	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi tenaga perpustakaan.
04.02	Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan	Arsip yang berkaitan dengan penilaian jabatan fungsional baik oleh tim penilai instansi/Perpustakaan Nasional RI maupun tim penilai pusat.
04.03	Pemasyarakatan	Arsip yang berkaitan dengan pemasyarakatan profesi pustakawan.
04.04	Evaluasi Tenaga Perpustakaan	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi tenaga perpustakaan.
PS.05	Pengelolaan Pangkalan Data/Basis Data Perpustakaan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan pangkalan data/basis data tenaga perpustakaan dan tim penilai perpustakaan.
DK	PENDIDIKAN	
DK.01	Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
01.01	Penyelenggaraan PAUD	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan PAUD meliputi uji kompetensi, penilaian dan penetapan kinerja lembaga, penyusunan bahan ajar, pelatihan, pengelolaan <i>block grant</i> hingga sosialisasi penyelenggaraan PAUD.
01.02	Pendidikan Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat meliputi penyusunan bahan ajar, pemberian bantuan sosial, pendampingan pelaksanaan program, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyelenggaraan lomba/pemberian penghargaan/anugerah hingga pelaksanaan sosialisasi.
01.03	Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan hari anak nasional dan internasional.



01.04	Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan kursus dan pelatihan bagi masyarakat meliputi uji kompetensi, penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan, pendataan dan penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra, pemberian bantuan sosial, pembinaan program, penyusunan standar kursus dan pelatihan, sertifikasi lembaga kursus dan pelatihan serta sosialisasi penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
<b>DK.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Dasar</b>	
02.01	Penyelenggaraan Sekolah Dasar	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar meliputi penyusunan kurikulum, bahan ajar, pelatihan, pengurusan block grant, bimbingan teknis, penyelenggaraan lomba/sayembara/festival, pemberian bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin serta pengelolaan data induk siswa.
02.02	Dokumen Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama meliputi penyusunan kurikulum, bahan ajar, pelatihan, pengurusan block grant, bimbingan teknis, penyelenggaraan lomba/sayembara/festival, pemberian bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin serta pengelolaan data induk siswa.
02.03	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus- Layanan Khusus/PK-LK	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan khusus meliputi penyusunan bahan ajar, kurikulum, alat bantu pembelajaran, petunjuk teknis, pengurusan block grant, penyelenggaraan lomba/sayembara/festival, sosialisasi, pendataan serta pengelolaan kelembagaan pendidikan khusus-layanan khusus.
<b>DK.03</b>	<b>Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas, penilaian prestasi kerja, pemberian penghargaan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan, pengurusan <i>block grant</i> serta sosialisasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.



<b>DK.04</b>	<b>Pembinaan Kurikulum</b>	
04.01	Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kurikulum pendidikan.
04.02	Evaluasi Penyusunan Kurikulum	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi penyusunan kurikulum pendidikan.
<b>DK.05</b>	<b>Pengadaan Buku Pelajaran</b>	
		Arsip yang berkaitan dengan pengadaan buku pelajaran mulai dari penyusunan standar mutu buku, pengumpulan naskah, penilaian mutu baku dan pemilihan, persetujuan dan pengesahan naskah, distribusi buku, pengembangan naskah hingga pengkajian buku.
<b>DK.06</b>	<b>Penilaian Pendidikan</b>	
06.01	Penilaian Akademik	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian akademik.
06.02	Penilaian non akademik	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian non akademik.
06.03	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan sistem informasi penilaian.
<b>DK.07</b>	<b>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>	
07.01	Pengembangan dan Pelindungan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan pelindungan bahasa mulai dari kegiatan pengkajian, pembakuan dan pelindungan serta publikasi.
07.02	Pembinaan dan Pemasarakatan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan dan pemasarakatan bahasa meliputi penyuluhan dan bantuan teknis.
07.03	Pembelajaran	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran bahasa dan kesusateraan.
07.04	Peningkatan dan Pengendalian	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan fungsi dan peran serta pengendalian penggunaan bahasa.
<b>DK.08</b>	<b>Pengembangan SDM Pendidikan serta Penjaminan Mutu Pendidikan</b>	
08.01	Pengembangan Profesi Pendidik	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan profesi pendidik meliputi peningkatan kompetensi dan sertifikasi.

08.02	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan tenaga kependidikan meliputi pengembangan tenaga teknis dan fungsional pedidik serta pimpinan dan pegawai.
08.03	Penjaminan Mutu Pendidikan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu pendidikan mulai dari pemetaan mutu sampai dengan pengelolaan sistem informasi.
08.04	Penyusunan Panduan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan panduan pengembangan meliputi materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman dan proposal/TOR/KAK.
08.05	Penyelenggaraan Pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan pelatihan/diseminasi/sosialisasi mutu pendidikan.
08.06	Penyelenggaraan Bimtek/Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi mutu pendidikan.
08.07	Penyaluran <i>Block Grant</i> Pascabencana	Arsip yang berkaitan dengan penyaluran block grant pascabencana.
08.08	Penyelenggaraan Lomba Pendidikan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan/keikutsertaan lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional dan internasional.
<b>DK.09</b>	<b>Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan</b>	
09.01	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film serta berbasis multimedia dan web meliputi perancangan dan produksi serta penyiaran dan pengendalian.
09.02	Pengembangan Jejaring	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan jejaring pembelajaran meliputi pengkajian dan perancangan serta pemeliharaan dan pengendalian.
<b>DK.10</b>	<b>Pengelolaan Data dan Statistik Pendidikan</b>	

10.01	Pengelolaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan.
10.02	Pengelolaan Data Peserta Didik	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data peserta didik meliputi validasi dan integrasi data.
10.03	Pengelolaan Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data satuan pendidikan dan proses pembelajaran.
10.04	Pendayagunaan dan Pelayanan Data	Arsip yang berkaitan dengan pendayagunaan dan pelayanan data pendidikan.
<b>DK.11</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pembinaan pendidikan.
<b>BD</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	
<b>BD.01</b>	<b>Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman</b>	
01.01	Registrasi Nasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan registrasi nasional pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
01.02	Pelindungan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelindungan cagar budaya dan permuseuman meliputi perizinan dan pengamanan serta pemeliharaan dan pemugaran.
01.03	Pengembangan dan Pemanfaatan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman.

01.04	Eksplorasi dan Dokumentasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan dokumentasi cagar budaya dan permuseuman.
<b>BD.02</b>	<b>Pembinaan Kesenian dan Perfilman</b>	
02.01	Pembinaan Seni Pertunjukan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan seni pertunjukan.
02.02	Pembinaan Seni Rupa	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan seni rupa murni dan terapan.
02.03	Pembinaan Literasi dan Apresiasi Film	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan literasi dan apresiasi film.
02.04	Dokumentasi dan Publikasi	Arsip yang berkaitan dengan dokumentasi dan publikasi seni dan film.
<b>BD.03</b>	<b>Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi</b>	
03.01	Kelembagaan dan Kepercayaan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.
03.02	Pembinaan Komunitas Kepercayaan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.
03.03	Ekspresi Pengetahuan dan Budaya Tradisional	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan ekspresi pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
03.04	Pembinaan Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan lingkungan budaya dan pranata sosial kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
<b>BD.04</b>	<b>Pembinaan Sejarah dan nilai budaya</b>	
04.01	Penggalian dan Penulisan Sejarah	Arsip yang berkaitan dengan Pembinaan sejarah dan nilai budaya melalui penggalian dan penulisan sejarah.
04.02	Pemetaan dan Klasifikasi Nilai	Arsip yang berkaitan dengan pemetaan dan klasifikasi nilai sejarah dan nilai budaya.

04.03	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Arsip yang berkaitan dengan verifikasi dan perumusan nilai sejarah dan nilai budaya.
04.04	Dokumentasi dan publikasi Sejarah	Arsip yang berkaitan dengan dokumentasi dan publikasi nilai sejarah dan nilai budaya.
<b>BD.05</b>	<b>Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya</b>	
05.01	Internalisasi Nilai Budaya	Arsip yang berkaitan dengan internalisasi nilai budaya meliputi pengemasan dan penamaan nilai budaya.
05.02	Internalisasi Kekayaan Budaya	Arsip yang berkaitan dengan internalisasi kekayaan budaya meliputi pencatatan dan penetapan budaya.
05.03	Internalisasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Arsip yang berkaitan dengan internalisasi warisan budaya nasional dan dunia baik benda maupun non benda.
05.04	Internalisasi Diplomasi Budaya	Arsip yang berkaitan dengan internalisasi diplomasi budaya baik dalam maupun luar negeri.
<b>BD.06</b>	<b>Pengembangan SDM Kebudayaan serta Penjaminan Mutu Kebudayaan</b>	
06.01	Pengembangan SDM Kebudayaan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan SDM kebudayaan meliputi peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
06.02	Penjaminan Mutu Kebudayaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu kebudayaan mulai dari pemetaan mutu sampai dengan pengelolaan sistem informasi.
06.03	Penyusunan Panduan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan panduan pengembangan meliputi materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman dan proposal/TOR/KAK.
06.04	Penyelenggaraan Pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan pelatihan/diseminasi/sosialisasi mutu kebudayaan.
06.05	Penyelenggaraan Bimtek/Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi mutu kebudayaan.
06.06	Penyaluran <i>Block Grant</i> Pascabencana	Arsip yang berkaitan dengan penyaluran <i>block grant</i> pascabencana.

06.07	Penyelenggaraan Lomba	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan /keikutsertaan lomba/sayembara/festival/olimpiade kebudayaan nasional dan internasional.
<b>BD.07</b>	<b>Pengembangan Arkeologi</b>	
07.01	Program dan Kerja Sama Penelitian	Arsip yang berkaitan dengan program dan kerja sama penelitian di bidang arkeologi.
07.02	Data dan Informasi Penelitian	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi penelitian arkeologi.
<b>BD.08</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pembinaan kebudayaan.
<b>PO</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	
<b>PO.01</b>	<b>Pemberdayaan Pemuda</b>	
01.01	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	Arsip yang berkaitan dengan peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda mulai dari kegiatan penelusuran duta kepemudaan, pengkajian atau penyusunan rekomendasi kepemudaan sampai dengan pengembangan potensi kepemudaan.
01.02	Peningkatan Wawasan Pemuda	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan wawasan pemuda meliputi penyusunan program dan evaluasi wawasan kebangsaan, wawasan lingkungan, wawasan sosial dan hukum.
01.03	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan wawasan pemuda meliputi penyusunan program dan evaluasi peningkatan kapasitas iman dan taqwa, kapasitas IPTEK, serta kapasitas pemanfaatan IPTEK.
01.04	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni kepemudaan)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda mulai dari kegiatan pengkajian, pengembangan, sampai dengan pendayagunaan fasilitas.
<b>PO.02</b>	<b>Pengembangan Pemuda</b>	
02.01	Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan mulai dari penyusunan program sampai dengan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda .



02.02	Pengembangan Kewirausahaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kewirausahaan mulai dari penyusunan program sampai dengan evaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan meliputi pengembangan kelembagaan, pengaderan, dan perintisan kewirausahaan.
02.03	Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan mulai dari penyusunan program sampai dengan evaluasi kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan, dan organisasi kepramukaan meliputi pengembangan kelembagaan dan sumber daya program.
02.04	Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Kepemudaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur kepemudaan meliputi pengembangan standarisasi organisasi, serta prasarana dan sarana kepemudaan
02.05	Pengembangan Kemitraaan dan Penghargaan Pemuda	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kemitraan dan pemberian penghargaan pemuda meliputi pengembangan kemitraan lintas sektoral serta pengembangan penghargaan dan promosi kepemudaan.
<b>PO.03</b>	<b>Pembudayaan Olahraga</b>	
03.01	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan olahraga pendidikan mulai dari pengembangan samapi dengan evaluasi pengelolaan olahraga pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi serta pendidikan formal dan non formal.
03.02	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan olahraga rekreasi mulai dari pengembangan sampai dengan evaluasi pengelolaan olahraga massal, olahraga tradisional serta olahraga petualangan, tantangan dan wisata.

03.03	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga mulai dari pengembangan sampai dengan evaluasi pengelolaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga.
03.04	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus meliputi pengembangan olahraga tradisional lokal dan nasional serta layanan olahraga usia dini, lansia dan penyandang cacat.
03.05	Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga meliputi kemitraan keolahragaan lintas sektoral, daerah dan luar negeri serta pemberian penghargaan olahraga.
<b>PO.04</b>	<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>	
04.01	Pembibitan Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan prestasi olahraga melalui pembibitan olahraga meliputi kegiatan pemanduan bakat, pengembangan olahragawan berbakat, pengembangan olahragawan berbakat dan kompetisi.
04.02	Pengembangan IPTEK Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan IPTEK olahraga melalui pembibitan olahraga meliputi penerapan dan pengembangan IPTEK olahraga.
04.03	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan meliputi pengembangan pelatih dan instruktur, wasit, juri, tenaga pendidik dan pendukung serta pengembangan organisasi keolahragaan.

04.04	Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan industri dan promosi olahraga meliputi pengembangan industri jasa olahraga, produk olahraga, manajemen industri olahraga serta penelusuran dan penyelenggaraan promosi olahraga.
04.05	Pengembangan Olahraga Prestasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan internasional.
04.06	Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur olahraga meliputi standarisasi, akreditasi dan sertifikasi, serta pengembangan infrastruktur olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan rekreasi.
<b>PE</b>	<b>PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	
<b>PE.01</b>	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	
01.01	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Arsip terkait dengan pengembangan perancangan destinasi dan investasi pariwisata meliputi pengembangan destinasi dan investasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata (perancangan destinasi pariwisata), pengembangan zona kreatif serta investasi pariwisata.
01.02	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan daya tarik wisata meliputi kegiatan bimtek, fasilitasi pengembangan daya tarik wisata, pengembangan daya tarik wisata kota pusaka, penilaian kelayakan tugas pembantuan, serta penghargaan pengelolaan (cipta award).
01.03	Pengembangan Industri Pariwisata	Arsip terkait dengan pengembangan industri pariwisata meliputi sarana pariwisata, jasa pariwisata, pengembangan wisata kuliner dan belanja.
01.04	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Arsip terkait dengan pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata meliputi perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat.

01.05	Pengembangan Wisata Minat Khusus	Arsip terkait dengan pengembangan wisata kuliner dan belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif dan event.
<b>PE.02</b>	<b>Pemasaran Pariwisata</b>	
02.01	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Arsip terkait dengan pengembangan pasar dan informasi pariwisata meliputi pasar dalam negeri, pasar luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta perancangan pemasaran pariwisata.
02.02	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Arsip terkait dengan promosi pariwisata luar negeri meliputi wilayah ASEAN, ASIA, Timur Tengah dan Afrika, Ameika dan Pasifik, Eropa.
02.03	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Arsip terkait dengan promosi wisata dalam negeri.
02.04	Pencitraan Indonesia	Arsip yang berkaitan dengan pencitraan Indonesia meliputi strategi pencitraan Indonesia melalui media cetak, media elektronik, digital, media ruang, kerja sama dan kemitraan.
02.05	Promosi Wisata Minat Khusus	Arsip yang berkaitan dengan promosi wisata konvensi, insentif, event dan minat khusus meliputi Promosi KIE korporasi, promosi KIE pemerintah dan non pemerintah, promosi minat khusus.
<b>PE.03</b>	<b>Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya</b>	
03.01	Pengembangan Industri Perfilman	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan industri perfilman meliputi fasilitasi industri perfilman, festival dan eksibisi film, produksi dan pemasaran film.
03.02	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan seni, pengembangan industri musik, pemasaran seni dan industri musik, infrastruktur dan dokumentasi seni dan industri musik.
03.03	Pengembangan Seni Rupa	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan seni rupa murni, seni rupa terapan fotografi serta pemasaran dan pengembangan apresiasi.



<b>PE.04</b>	<b>Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)</b>	
04.01	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media meliputi pengembangan film animasi dan komik, pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi, pengembangan karya kreatif audio dan video, pengembangan karya kreatif iklan cetak dan elektronik.
04.02	Desain dan Arsitektur	Arsip yang berkaitan dengan desain dan arsitektur meliputi arsitektur dan desain interior, komunikasi visual, desain produk dan kemasan serta mode.
04.03	Kerja Sama dan Fasilitasi	Arsip yang berkaitan dengan kerjasama dan fasilitasi meliputi lisensi teknologi, sentra inovasi dan inkubator bisnis, sentra kreatif, akses pembiayaan pengembangan sentra inovasi, inkubator bisnis serta sentra kreatif.
<b>PE.05</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif, pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kompetensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
05.01	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	Arsip yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan meliputi program dan evaluasi kepariwisataan, data dan publikasi kepariwisataan.
05.02	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Arsip yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif meliputi program dan evaluasi ekonomi kreatif, data dan publikasi ekonomi kreatif.

05.03	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi kreatif	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi program dan evaluasi SDM, penyelenggaraan dan kerja sama.
05.04	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Arsip yang berkaitan dengan kompetensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi program dan evaluasi, penyelenggaraan dan kerja sama.
PE.06	Penyusunan Laporan Statistik Kepariwisata	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan laporan meliputi laporan statistik bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
<b>PM</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
<b>PM.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Penanaman Modal</b>	
01.01	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana penanaman modal bidang industri agribisnis, energi, dan sumber daya mineral.
01.02	Perencanaan Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana penanaman modal bidang industri manufaktur meliputi industri logam, mesin, tekstil, industri kimia serta industri alat transportasi dan telematika.
01.03	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana penanaman modal bidang jasa dan kawasan meliputi jasa perdagangan, jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, jasa lainnya serta kawasan ekonomi.
01.04	Perencanaan Infrastruktur	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana penanaman modal bidang infrastruktur.
<b>PM.02</b>	<b>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	
02.01	Deregulasi Penanaman Modal	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan deregulasi penanaman modal dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal.
02.02	Pengembangan Potensi Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi daerah meliputi sektor primer dan tersier serta sekunder.
02.03	Pemberdayaan Usaha	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan usaha meliputi pembinaan dan penyuluhan, kemitraan usaha, dan pelayanan usaha.



<b>PM.03</b>	<b>Promosi Penanaman Modal</b>	
03.01	Pengembangan Promosi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan promosi penanaman modal meliputi analisis target promosi dan daya saing promosi.
03.02	Promosi Sektoral	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan promosi penanaman modal meliputi sektor industri sumber daya alam, jasa dan kawasan, industri manufaktur serta industri infrastruktur.
03.03	Pameran dan Sarana Promosi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan promosi penanaman modal melalui pameran dan sarana promosi baik cetak maupun elektronik.
<b>PM.04</b>	<b>Pelayanan Penanaman Modal</b>	
04.01	Pelayanan Aplikasi	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan aplikasi penanaman modal melalui aplikasi untuk sektor primer dan tersier serta sekunder.
04.02	Pelayanan Perizinan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perizinan penanaman modal meliputi perizinan sektor primer dan tersier serta sektor sekunder.
04.03	Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pemberian layanan perizinan bidang kesehatan.
04.04	Pelayanan Perizinan Bidang Industri Makanan/Minimarket	Arsip yang berkaitan dengan pemberian layanan perizinan bidang industri makanan/minimarket.
04.05	Pelayanan Fasilitas	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas penanaman modal meliputi perizinan sektor primer dan tersier serta sektor sekunder.
<b>PM.05</b>	<b>Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pelayanan penanaman modal meliputi pemantauan, bimbingan/sosialisasi, fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan, pencabutan/pembatalan perizinan serta penyusunan kualifikasi pelayanan terpadu satu pintu.
<b>PM.06</b>	<b>Pelaporan Bidang Penanaman Modal</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan bidang penanaman modal meliputi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

<b>PD</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	
<b>PD.01</b>	<b>Pembinaan Perdagangan dalam Negeri</b>	
01.01	Bina Usaha	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan usaha perdagangan dalam negeri meliputi pembinaan kelembagaan dan penguatan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing dan keagenan, informasi perusahaan, serta pelaku pasar.
01.02	Pembinaan Perdagangan Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan usaha perdagangan kecil menengah dan produk dalam negeri meliputi bimbingan teknis tentang iklim usaha, fasilitasi usaha dan pemasaran, pengembangan produk lokal, serta pencitraan produk dalam negeri.
01.03	Pengembangan Logistik dan Sarana Distribusi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan logistik dan sarana distribusi meliputi pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama pengembangan sistem logistik dan informasi serta bimbingan teknis penyedia jasa logistik.
01.04	Pengelolaan Bahan Pokok dan Barang Strategis	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan bahan pokok dan barang strategis meliputi informasi pasar, hasil industri, barang strategis serta bahan pokok agro.
<b>PD.02</b>	<b>Pengelolaan Standarisasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen</b>	
02.01	Standardisasi Perdagangan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan standarisasi perdagangan meliputi kelembagaan dan informasi standar, kerja sama standarisasi, serta perumusan dan penerapan standar.
02.02	Pemberdayaan Konsumen	Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan konsumen meliputi kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggara perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta pemberdayaan badan penyelesaian sengketa



		konsumen.
02.03	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan barang beredar dan jasa meliputi produk pertambangan dan aneka industri, produk pertanian, kimia dan kehutanan, serta jasa dan kerja sama lembaga pemerintah dan non pemerintah.
02.04	Metrologi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan standarisasi perdagangan metrologi meliputi sarana dan kerja sama, kelembagaan dan penilaian, UTTP dan standar ukuran, pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengelolaan oleh balai pengelolaan standar nasional satuan ukuran (SNSU).
<b>PD.03</b>	<b>Pembinaan Perdagangan Luar Negeri</b>	
03.01	Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan ekspor produk pertanian dan kehutanan meliputi ekspor produk tanaman pangan, perikanan dan peternakan, perkebunan, hortikulasi, rempah dan tanaman obat, serta hasil hutan.
03.02	Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan ekspor produk industri dan pertambangan meliputi produk TPT, aneka dan jasa, produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, produk industri agro dan kimia, serta produk migas dan pertambangan.
03.03	Impor	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan impor meliputi impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, serta barang konsumsi.

03.04	Fasilitasi Ekspor dan Impor	Arsip yang berkaitan dengan fasilitasi ekspor dan impor meliputi kerja sama internasional, sumber pembiayaan dan sistem pembiayaan ekspor dan impor, penunjang perdagangan internasional, serta pelayanan perdagangan.
03.05	Pengamanan Perdagangan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan pengamanan perdagangan meliputi monitoring hambatan perdagangan, penanganan hambatan teknis dan perdagangan, serta penanganan tuduhan.
<b>PD.04</b>	<b>Pembinaan Kerja Sama Perdagangan Internasional</b>	
04.01	Multilateral	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan perdagangan multilateral meliputi akses pasar barang pertanian dan non pertanian, fasilitas dan aturan perdagangan, hak kekayaan intelektual, investasi lingkungan serta ketentuan perdagangan dan notifikasi.
04.02	ASEAN	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kerja sama perdagangan di wilayah ASEAN meliputi kerja sama perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN I berupa perdagangan barang, fasilitasi perdagangan barang, Masyarakat Ekonomi Asean II berupa investasi dan daya saing serta isu Lainnya serta ASEAN Mitra Dialog dan kerja sama antar dan sub regional.
04.03	APEC dan Organisasi Internasional Lainnya	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kerja sama perdagangan APEC dan organisasi lainnya meliputi akses perdagangan dan investasi APEC, fasilitasi perdagangan dan investasi APEC, badan-badan PBB dan non PBB, serta organisasi komiditi internasional.
04.04	Bilateral	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kerja sama perdagangan bilateral dengan berbagai negara.
04.05	Perundingan Perdagangan Jasa	Arsip yang berkaitan dengan perundingan perdagangan jasa meliputi jasa bisnis, distribusi, keuangan, jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya, olahraga, transportasi, jasa pendidikan, kesehatan serta peraturan domestik.
<b>PD.05</b>	<b>Pembinaan Perdagangan Ekspor Nasional</b>	



05.01	Pasar dan Informasi Ekspor	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan pasar dan informasi ekspor meliputi pengembangan pasar, pengembangan sistem informasi ekspor, sistem informasi ekspor, dan pelayanan informasi ekspor.
05.02	Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan produk ekspor dan ekonomi kreatif meliputi kegiatan industri manufaktur, produk Agro, Jasa, serta ekonomi kreatif.
05.03	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kerja sama pengembangan ekspor baik luar negeri maupun dalam negeri.
05.04	Promosi dan Citra	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan promosi dan citra perdagangan meliputi promosi, perencanaan dan pemantauan citra, dan penerapan citra.
05.05	Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan berjangka komoditi meliputi kegiatan bina usaha, pengawasan transaksi, serta pengawasan keuangan dan audit.
05.06	Analisis Pasar	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan analisis pasar meliputi pengkajian pasar, pengembangan pasar, dan sistem informasi pasar.
05.07	Pembinaan Pasar Fisik dan Jasa	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan pasar fisik dan jasa meliputi pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang, pengawasan pasar lelang, dan pengawasan sistem resi gudang.
05.08	Bimbingan Teknis Ekspor	Arsip yang berkaitan dengan bimbingan teknis perdagangan ekspor.
05.09	Evaluasi Perdagangan Ekspor Nasional	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi perdagangan ekspor nasional.
<b>PI</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	
<b>PI.01</b>	<b>Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama</b>	

01.01	Pengembangan Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri manufaktur yang terdiri dari industri material logam, kimia dasar, kimia hilir dan tekstil.
01.02	Pengembangan Industri Agro	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri agro yang terdiri dari industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman tembakau.
01.03	Pengembangan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan berbasis teknologi tinggi meliputi alat transportasi darat, laut dan udara, industri pertahanan, elektronika dan telematika, serta alat pertanian.
01.04	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah terdiri dari industri pangan, kimia, dan bahan bangun, serta industri kerajinan dan sandang.
<b>PI.02</b>	<b>Promosi Industri</b>	
02.01	Promosi Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan promosi industri manufaktur yang terdiri dari industri material logam, kimia dasar, kimia hilir dan tekstil.
02.02	Promosi Industri Agro	Arsip yang berkaitan dengan promosi industri agro yang terdiri dari industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman tembakau.
02.03	Promosi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Arsip yang berkaitan dengan promosi industri unggulan berbasis teknologi yang meliputi alat transportasi darat, industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan, elektronika dan telematika, serta permesinan.
02.04	Promosi Industri Kecil dan Menengah	Arsip yang berkaitan dengan promosi insutri kecil dan menengah yang terdiri dari industri pangan, kimia dan bahan bangunan, serta industri kerajinan dan sandang.
<b>PI.03</b>	<b>Pengembangan Standarisasi dan Teknologi Industri</b>	

03.01	Pengembangan Standarisasi dan Teknologi Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan standarisasi dan teknologi pada industri manufaktur yang terdiri dari industri material, industri kimia dasar, industri kimia hilir, dan industri tekstil.
03.02	Pengembangan Standarisasi dan Teknologi Industri Agro	Arsip yang berkaitan dengan standarisasi dan teknologi pada industri agro yang terdiri dari industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
03.03	Pengembangan Standarisasi dan Teknologi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan standarisasi dan teknologi ndustri unggulan berbasis teknologi tinggi.
03.04	Pengembangan Standarisasi dan Teknologi Industri Kecil dan Menengah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan standarisasi dan teknologi pada industri kecil dan menengah yang meliputi industri pangan, kimia dan bahan bangunan, serta industri kerajinan dan sandang.
<b>PI.04</b>	<b>Pengusulan Hak dan Kekayaan Intelektual Industri</b>	
04.01	Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan pengusulan hak dan kekayaan intelektual pada industri manufaktur yang meliputi industri material logam, industri kimia dasar, industri kimia hilir dan industri tekstil.
04.02	Industri Agro	Arsip yang berkaitan dengan pengusulan hak dan kekayaan intelektual pada industri agro yang meliputi Industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta idustri minuman dan tembakau.
04.03	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Arsip yang berkaitan dengan pengusulan hak dan kekayaan intelektual pada industri unggulan berbasis teknologi tinggi yang meliputi industri transportasi darat, industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan, elektronika dan telematika, serta permesinan.

04.04	Industri Kecil dan Menengah	Arsip yang berkaitan dengan pengusulan hak dan kekayaan intelektual pada industri kecil dan menengah yang meliputi meliputi industri pangan, kimia dan bahan bangunan, serta industri kerajinan dan sandang.
<b>PI.05</b>	<b>Pengembangan Industri Hijau</b>	
05.01	Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri hijau pada industri manufaktur yang terdiri dari industri material, industri kimia dasar, industri kimia hilir, dan industri tekstil.
05.02	Industri Agro	Arsip yang berkaitan dengan industri hijau pada industri agro yang meliputi industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
05.03	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri hijau pada industri unggulan berbasis teknologi.
05.04	Industri Kecil dan Menengah	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan industri hijau pada industri kecil dan menengah yang meliputi meliputi industri pangan, kimia dan bahan bangunan, serta industri kerajinan dan sandang.
<b>PI.06</b>	<b>Analisis Industri Unggulan Kabupaten</b>	Arsip yang berkaitan dengan analisis industri unggulan kabupaten.
<b>PI.07</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten</b>	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kompetensi inti industri kabupaten.
<b>PI.08</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pendukung industri.
<b>PI.09</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri</b>	Arsip yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan kawasan industri.
<b>PI.10</b>	<b>Kerja Sama Industri Internasional</b>	
10.01	Kerja sama Industri Internasional Wilayah I	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama industri internasional wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah dan Fora meliputi kerja sama akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri serta kerja sama industri multilateral lainnya.

10.02	Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Flora Regional	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri serta kerja sama regional di wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan flora regional meliputi kerja sama akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri, serta kerja sama industri regional lainnya.
10.03	Ketahanan Industri	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan ketahanan industri meliputi penanganan hambatan dan penanganan industri pada wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan fora multilateral), dan Wilayah II (Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, dan fora multilateral).
<b>PI.11</b>	<b>Pengelolaan Implementasi Standarisasi</b>	
11.01	Standar	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan standar industri manufaktur, industri agro dan teknologi tinggi.
11.02	Penyiapan Penerapan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan penerapan standarisasi dan kerja sama standarisasi industri.
11.03	Infrastruktur Standar	arsip yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur standar dan pengawasan lembaga penilaian kesuaian.
<b>PI.12</b>	<b>Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri</b>	
12.01	Pengkajian Kebijakan Industri	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan industri sektoral dan kewilayahan.
12.02	Perpajakan dan Tarif	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan perpajakan dan tarif maupun tarif non tarif.
12.03	Pengembangan Model Industrial	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan model industrial mulai dari pemrograman model sampai dengan aplikasi model.
<b>PI.13</b>	<b>Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup</b>	
13.01	Industri Hijau	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian pengembangan industri hijau dan kerja sama industri hijau.

13.02	Lingkungan Hidup	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan hidup terdiri dari lingkungan global dan pengendalian lingkungan hidup.
13.03	Energi	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian energi termasuk konservasi energi dan diversifikasi energi.
<b>PI.14</b>	<b>Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual</b>	
14.01	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi industri.
14.02	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan penerapan inovasi teknologi industri.
14.03	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Arsip yang berkaitan dengan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.
<b>UK</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)</b>	
<b>UK.01</b>	<b>Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UKM</b>	
01.01	Pengembangan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan badan hukum koperasi meliputi organisasi koperasi dan UKM, badan hukum koperasi dan UKM, serta penelaahan kasus hukum.
01.02	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan bidang koperasi dan UMKM mulai dari penyusunan sampai dengan evaluasi perundang-undangan Koperasi dan UMKM.
01.03	Penatalaksanaan Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan tata laksana koperasi baik primer maupun sekunder, serta klasifikasi koperasi dan UKM.

01.04	Pengelolaan Keanggotaan Koperasi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keanggotaan koperasi terdiri dari partisipasi usaha dan permodalan, partisipasi pengawasan dan pengembangan anggota.
01.05	Pengendalian dan Akuntabilitas	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian dan akuntabilitas mulai dari pengendalian intern serta tindak lanjutnya, akuntabilitas, akuntansi dan audit, sampai dengan monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi dan UKM.
<b>UK.02</b>	<b>Pengelolaan Produksi Koperasi dan UMKM</b>	
02.01	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi segala hal yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura dan sarana produksi maupun pengolahan.
<del>02.01</del> / 02.02	Perikanan dan Peternakan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan produksi perikanan dan peternakan termasuk sarana produksi dan sarana pengolahannya.
02.03	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan ketenagalistrikan dan konstruksi, aneka usaha, serta pariwisata, pos dan telekomunikasi.
<b>UK.03</b>	<b>Pembiayaan Usaha Koperasi dan UMKM</b>	
03.01	Penyusunan Program Pendanaan Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan program pendanaan koperasi dan UKM baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, serta program pendanaan usaha mikro dan dana bergulir.
03.02	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan pengendalian simpan pinjam pada KSP, USP Koperasi dan USP-LKM.
03.03	Pengelolaan Permodalan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan permodalan yang meliputi pengembangan permodalan sendiri, pengembangan permodalan luar dan pengembangan kredit program.
03.04	Pengelolaan Asuransi dan Jasa Keuangan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan asuransi koperasi dan UKM, Perpajakan koperasi dan UKM, dan jasa keuangan dan kredit komersial.

03.05	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Arsip yang berkaitan dengan pembiayaan dan penjaminan kredit dari lembaga pembiayaan, penjamin kredit dan pasar modal.
<b>UK.04</b>	<b>Pemasaran dan Jaringan Usaha</b>	
04.01	Perdagangan Dalam Negeri	Arsip yang berkaitan dengan pemasaran dan jaringan usaha perdagangan dalam negeri mulai dari pengadaan, distribusi, sampai dengan pengembangan sektor formal dan informal.
04.02	Ekspor dan Impor	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan jaringan usaha ekspor dan impor serta hubungan perdagangan internasional dan hubungan perdagangan multilateral, regional dan bilateral.
04.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran serta pengembangan potensi pemasaran.
04.04	Pembinaan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan UKM, serta pengembangan kerja sama kelembagaan.
04.05	Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan publikasi bisnis koperasi dan UKM mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan informasi, sampai dengan publikasi dan promosi.
04.06	Pengembangan Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan lembaga layanan pemasaran LLP Koperasi dan UKM.
<b>UK.05</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan UMKM</b>	
05.01	Pengembangan Kewirausahaan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan meliputi lembaga kewirausahaan, penumbuhan kewirausahaan, dan sosialisasi kewirausahaan.
05.02	Implementasi Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan koperasi dan UKM dapat berupa diklat formal, informal, ataupun diklat non formal, serta kerja sama lembaga diklat.

05.03	Pengelolaan Peran Serta Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan peran serta masyarakat dalam peningkatan dukungan media masa, LSM dan organisasi profesi terhadap Koperasi dan UKM.
05.04	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi diklat koperasi dan UKM baik diklat formal maupun informal serta yang diadakan oleh lembaga diklat pemerintah maupun non pemerintah.
05.05	Advokasi	Arsip yang berkaitan dengan advokasi organisasi dan manajemen, kemitraan dan teknologi, serta peraturan perundang-undangan.
<b>UK.06</b>	<b>Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</b>	
06.01	Pengembangan Produktivitas dan Mutu	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan produktivitas dan peningkatan mutu serta sertifikasi, label dan merek produk.
06.02	Restrukturisasi Usaha	Arsip yang berkaitan dengan restrukturisasi usaha meliputi restrukturisasi manajemen, pendanaan, kelembagaan koperasi dan UKM.
06.03	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis (LPS) meliputi kelembagaan Lembaga pengembangan Bisnis (LPB), pengembangan bisnis LPB, dan pengembangan jaringan LPB.
06.04	Fasilitasi Investasi UKMK	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi UKMK meliputi kegiatan investasi klaster UKMK, pengembangan kerja sama investasi usaha, dan fasilitasi investasi aneka usaha UKMK.
06.05	Pengembangan Sistem Bisnis	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem bisnis dari segi fasilitasi transaksi, kerjasama usaha dan jaringan komunikasi bisnis.
<b>UK.07</b>	<b>Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM</b>	



07.01	Penelitian Koperasi	Arsip yang berkaitan dengan penelitian koperasi mulai dari perencanaan dan pengendalian, penyelenggaraan sampai dengan tata laksana penelitian.
07.02	Penelitian UKM	Arsip yang berkaitan dengan penelitian UKM mulai dari perencanaan dan pengendalian, penyelenggaraan, sampai dengan tata laksana penelitian.
07.03	Penelitian Sumber Daya	Arsip yang berkaitan dengan penelitian sumber daya mulai dari perencanaan, penyelenggaraan sampai dengan tata laksana penelitian.
07.04	Pengembangan Perkaderan UMK	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan perkaderan UMK berupa penyuluhan, penilaian perkaderan, serta kerja sama dan jaringan.
<b>UK.08</b>	<b>Kerja Sama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga</b>	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama internasional dan hubungan antar lembaga di bidang koperasi dan UMK.
<b>TK</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	
TK.01	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tenaga kerja daerah mulai dari pelaksanaan kebijakan tenaga kerja daerah, pembinaan dan pemantauan perencanaan tenaga kerja daerah, sampai dengan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
TK.02	Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	

02.01	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan standarisasi kompetensi meliputi penerapan dan bimbingan penerapan standar kompetensi, pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, pengembangan program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan, serta pengembangan program pelatihan ketransmigrasian .
02.02	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan lembaga dan sarana pelatihan kerja meliputi pembinaan akreditasi dan pengembangan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas lembaga pelatihan, pengembangan standar mutu (PSM) lembaga pelatihan, serta sistem pendanaan dan kerja sama pelatihan kerja.
02.03	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan instruktur dan PSM lembaga pelatihan pemerintah, lembaga pelatihan swasta, dan tenaga pelatihan meliputi peningkatan kompetensi, pengembangan karir, serta pengelolaan sistem informasi instruktur, PSM, dan tenaga pelatihan.
02.04	Bina Pemagangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pemagangan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, perizinan dan advokasi pemagangan, serta promosi dan jenjang pemagangan.
02.05	Produktivitas dan Kewirausahaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan produktivitas dan kewirausahaan meliputi pengembangan promosi dan kerja sama produktivitas dan kewirausahaan, pengembangan sistem dan peningkatan produktivitas, pengembangan pengukuran dan kajian produktivitas, serta pengembangan kewirausahaan
<b>TK.03</b>	<b>Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja</b>	
03.01	Pengembangan Pasar Kerja	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pasar kerja meliputi pemberian informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, serta bursa kerja baik dalam maupun luar negeri

03.02	Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penempatan tenaga kerja dalam negeri meliputi penempatan antar kerja, penempatan tenaga kerja khusus, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta pemberdayaan pengantar kerja
03.03	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penempatan tenaga kerja di luar negeri meliputi pembinaan kelembagaan penempatan, perlindungan tenaga kerja Indonesia, serta kerja sama internasional penempatan tenaga kerja.
03.04	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan tenaga kerja sektor informal, termasuk kegiatan pengembangan padat karya pedesaan dan perkotaan, penerapan teknologi tepa guna, serta pemberdayaan pendampingan.
03.05	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing mulai dari analisa dan perizinan sektor industri dan sektor jasa sampai dengan pengendalian kerja sama kelembagaan.
03.06	Pengelolaan Standardisasi Profesi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan standarisasi profesi tenaga kerja meliputi pengelolaan sistem informasi dan registrasi serta pembakuan akreditasi.
<b>TK.04</b>	<b>Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	
04.01	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pemenuhan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisis diskriminasi.
04.02	Pembinaan Kelembagaan dan Pemasayarakatan Hubungan Industrial	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan dan pemasayarakatan hubungan industrial meliputi pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, dan pemasayarakatan hubungan.

04.03	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pengupahan berdasarkan penerapan standar pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja.
04.04	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penyelesaian pelestarian hubungan industrial meliputi pencegahan dini, pencegahan penanganan mogok dan penutupan perusahaan, pengurusan perselisihan dan evaluasi pelaporan, serta pemberdayaan kelembagaan melalui fungsionalisasi perantara, legitimasi mediator, konsiliator dan arbitor, serta penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
<b>TK.05</b>	<b>Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	
05.01	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi norma waktu, norma hubungan kerja dan perlindungan, serta pengawasan norma penempatan dan latihan kerja.
05.02	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan norma kerja, pembinaan kerja sama lintas sektoral tenaga kerja, dan advokasi tenaga perempuan dan anak.
05.03	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan norma keselamatan kerja meliputi pengawasan norma mekanik, norma konstruksi, norma kesehatan, norma lingkungan serta norma kelembagaan, dan keahlian sistem manajemen K3.
05.04	Pelaporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan hasil pengawasan ketenagakerjaan.

05.05	Bina Penegakan Hukum	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan penegak hukum ketenagakerjaan meliputi pembinaan pemeriksa norma ketenagakerjaan, penyidik norma ketenagakerjaan, termasuk kegiatan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil, serta kerja sama penegakan hukum.
<b>TK.06</b>	<b>Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>	
06.01	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja
06.02	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan SDM dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja meliputi program, analisis, penyebarluasan informasi pengembangan SDM dan Kompetensi K3, serta kerja sama bidang pengembangan SDM dan Kompetensi K3 baik tingkat nasional, regional dan internasional, termasuk bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan SDM dan Kompetensi K3.
<b>PM</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>	
<b>PM.01</b>	<b>Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	
01.01	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, serta pembauran dan kewarganegaraan.

01.02	Pembinaan Kewaspadaan Nasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kewaspadaan nasional meliputi fasilitasi dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi bina masyarakat perbatasan, fasilitasi penanganan konflik, serta fasilitasi pengawasan orang asing dan lembaga.
01.03	Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketahanan seni, budaya, adat, agama, dan kemasyarakatan.
01.04	Pembinaan Politik Dalam Negeri	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan politik dalam negeri meliputi implementasi kebijakan publik, fasilitasi kelembagaan politik pemerintahan dan partai politik, penyelenggaraan pendidikan politik, dan pemilihan umum.
01.05	Pembinaan Ketahanan Ekonomi	Berkas kegiatan kegiatan pembinaan ketahanan ekonomi meliputi ketahanan sumberdaya alam dan kesenjangan perekonomian, ketahanan perdagangan investasi, fiskal dan moneter, perilaku perekonomian masyarakat, serta ketahanan lembaga sosial ekonomi.
<b>PM.02</b>	<b>Penyelenggaraan Fasilitasi Pemerintahan Umum</b>	
02.01	Dekonsentrasi dan Kerja Sama	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan dekonsentrasi dan kerja sama pemerintahan meliputi kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tugas bupati dan wakil bupati, kerja sama daerah, serta fasilitasi kecamatan dan pelayanan umum.
02.02	Fasilitasi Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi wilayah administrasi dan perbatasan meliputi kegiatan fasilitasi kegiatan topomoni dan data wilayah serta batas antar daerah wilayah.

02.03	Fasilitasi Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi polisi pamong praja perlindungan masyarakat meliputi tata operasional dan sarana polisi, peningkatan kapasitas SDM polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.
02.04	Fasilitasi Kawasan dan Pertanahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi kawasan dan pertanahan meliputi fasilitasi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan ekonomi, Industri dan perdagangan bebas, serta pertanahan dan kawasan khusus.
02.05	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi identifikasi potensi bahaya, penyusunan organisasi sistem dan prosedur, standarisasi sarana dan prasarana, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
<b>PM.03</b>	<b>Penyelenggaraan Otonomi Daerah</b>	
03.01	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, bimbingan, pengawasan dan monitoring penyelenggaraan pemerintah daerah.
03.02	Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran, otonomi khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
03.03	Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu kepala daerah, administrasi kepala daerah dan DPRD, penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan, monitoring, dan evaluasi hubungan antar lembaga.
03.04	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan daerah dan pengembangan kapasitas

		daerah.
<b>PM.04</b>	<b>Pembinaan Pembangunan Daerah</b>	
04.01	Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah	Arsip yang berkaitan dengan Berkas kegiatan perencanaan pembangunan daerah/per wilayah.
04.02	Pengembangan Wilayah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan wilayah mulai dari penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah, penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi, penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan kawasan strategis dan andalan, sampai dengan pengembangan wilayah tertinggal.
04.03	Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penataan ruang dan lingkungan hidup meliputi penataan ruang wilayah dan ruang kawasan, konservasi dan rehabilitasi, perencanaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pengendalian lingkungan hidup.
04.04	Pengembangan Ekonomi Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekonomi daerah meliputi mulai dari pengembangan potensi ekonomi daerah, promosi dan investasi, pengembangan prasarana dan sarana, serta kemitraan usaha hingga kelembagaan ekonomi daerah.
04.05	Penataan Perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penataan perkotaan meliputi perencanaan pengendalian perkotaan, penataan kota besar, metropolitan, dan kota kecil, serta kerja sama perkotaan.
<b>PM.05</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
05.01	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan meliputi administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengembangan dan permusyawaratan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta

		pengembangan kapasitas desa.
05.02	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan masyarakat meliputi pembinaan lembaga masyarakat, pembangunan partisipatif, pendataan potensi masyarakat, pengembangan kawasan perdesaan dan pelatihan masyarakat.
05.03	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat meliputi pemberdayaan budaya nusantara, perempuan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sosial, dan tenaga kerja perdesaan.
05.04	Usaha Ekonomi Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat meliputi usaha pertanian dan pangan, perkreditan dan simpan pinjam, usaha ekonomi dan keluarga, produksi dan pemasaran, serta pemberdayaan ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal.
05.05	Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan meliputi fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan, fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir, fasilitasi prasarana dan sarana, fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian, serta pemasyarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan.
<b>PM.06</b>	<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
06.01	Pendaftaran Penduduk	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran penduduk mulai dari pendaftaran identitas penduduk, pendaftaran pindah datang dalam wilayah NKRI dan antar negara, pendataan rentan bencana, hingga monitoring dan evaluasi.

06.02	Pencatatan Sipil	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan sipil meliputi kegiatan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian, adopsi anak, pencatatan kewarganegaraan, serta monitoring dan evaluasi hasil pencatatan sipil.
06.03	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan mulai dari sistem informasi, kelembagaan informasi, pengelolaan data, penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan, serta monitoring dan evaluasi pelayanan informasi kependudukan.
06.04	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kebijakan kependudukan meliputi kebijakan kuantitas penduduk, kebijakan kualitas penduduk, kebijakan mobilitas penduduk, pengembangan sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk, serta pengembangan wawasan kependudukan.
06.05	Penyerasian Kependudukan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyerasian kependudukan meliputi analisis dan pengembangan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, perencanaan kependudukan, kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah, serta pelaksanaan penyerasian kebijakan.
<b>PM.07</b>	<b>Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Daerah</b>	
07.01	Pengelolaan Anggaran Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran daerah meliputi fasilitasi anggaran daerah dan penyusunan dukungan teknis anggaran daerah.
07.02	Pengelolaan Pendapatan dan Investasi Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pendapatan dan investasi daerah meliputi pendapatan pajak dan retribusi daerah, BUMD, BLUD, pengelolaan kekayaan daerah serta investasi obligasi dan pinjaman/hibah daerah.

07.03	Fasilitasi Dana Perimbangan	Berkas kegiatan fasilitasi dana perimbangan meliputi pelaksanaan fasilitasi DAU, DAK, dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dana otonomi khusus, serta penyusunan dukungan teknis fasilitasi dana perimbangan.
07.04	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah meliputi fasilitasi bidang akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, kajian kebijakan dan bantuan keterangan ahli, serta pengelolaan data informasi dan pengelolaan keuangan daerah.
<b>PD</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
<b>PD.01</b>	<b>Pengendalian Penduduk</b>	
01.01	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan penyiapan fasilitas pemaduan kebijakan.
01.02	Penyusunan Rencana Pengendalian Penduduk	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana pengendalian penduduk meliputi penyusunan profil dan proyeksi, penetapan parameter pengendalian, serta pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk.
01.03	Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama pendidikan di bidang kependudukan mulai dari pengembangan sistem dan materi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sampai dengan monitoring dan evaluasi.
01.04	Analisis Dampak Kependudukan	Arsip yang berkaitan dengan analisis dampak kependudukan meliputi analisis dampak sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

PD,02	<b>Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</b>	
02.01	Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana jalur pemerintah meliputi pembinaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana pemerintah, serta pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah.
02.02	Bina Keikutsertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana jalur swasta meliputi pembinaan keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana swasta, serta pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana swasta.
02.03	Bina Keikutsertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, jalur wilayah miskin perkotaan, serta peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria.
02.04	Pembinaan Kesehatan Reproduksi	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan kesehatan reproduksi meliputi pembinaan kesehatan reproduksi untuk kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pencegahan pra menstruasi <i>syndrome</i> dan HIV/AIDS, serta pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas.
PD.03	<b>Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga</b>	
03.01	Bina Keluarga Balita dan Anak	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan keluarga balita dan anak meliputi kegiatan pembinaan kelembagaan keluarga balita dan anak serta monitoring dan evaluasi.

03.02	Bina Ketahanan Remaja	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan remaja meliputi pembinaan kelembagaan bina ketahanan remaja serta monitoring dan evaluasi.
03.03	Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan lansia dan usia rentan meliputi pengembangan program, pembinaan kelembagaan bina ketahanan keluarga lansia dan usia rentan, serta monitoring dan evaluasi.
03.04	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga meliputi pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga, serta monitoring dan evaluasi.
03.04 / 03.05	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sejahtera meliputi pengembangan program dan pembinaan kelembagaan pusat pelayanan keluarga sejahtera, serta monitoring dan evaluasi.
<b>PD.04</b>	<b>Pelayanan Advokasi dan Informasi Kependudukan</b>	
04.01	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kependudukan mulai dari pengembangan sampai dengan pelaksanaan advokasi dan pencitraan, serta komunikasi, informasi dan edukasi.
04.02	Bina Lini Lapangan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan terhadap tenaga lini lapangan meliputi pengembangan tenaga lini lapangan, pengembangan institusi masyarakat perdesaan, serta pengembangan.
<b>PD.05</b>	<b>Pelaporan Data Kependudukan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan data dan statistik kependudukan mulai dari pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis dan evaluasi.

PA	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PA.01	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengarusutamaan gender ekonomi, politik sosial dan hukum meliputi pengelolaan data gender, advokasi dan fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender.
PA.02	Perlindungan Perempuan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan perempuan meliputi pengelolaan data perlindungan perempuan, advokasi dan fasilitasi, sistem aplikasi dan jaringan informasi, analisis dan penyajian informasi, serta monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan.
PA.03	Perlindungan Anak	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak meliputi pengelolaan data perlindungan anak, advokasi dan fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak.
PA.04	Pengelolaan Tumbuh Kembang Anak	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan tumbuh kembang anak meliputi pengelolaan data tumbuh kembang anak, advokasi dan fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak.
PA.05	Pelaporan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
PT	PERTANIAN	

<b>PT.01</b>	<b>Peternakan</b>	
01.01	Perbibitan Ternak	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perbibitan ternak mulai dari produksi bibit ternak ruminansia dan non ruminansia, penilaian dan pelepasan bibit ternak, pengawasan mutu dan pengembangan bibit ternak, sampai dengan persetujuan pengeluaran/pemasukan.
01.02	Pembudidayaan Pakan Ternak	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan pakan ternak mulai dari pembudidayaan bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, pengawasan mutu pakan ternak, sampai dengan persetujuan pengeluaran/pemasukan.
01.03	Pembudidayaan Ternak	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan ternak mulai dari pembudidayaan ternak potong, ternak perah, ternak unggas dan aneka ternak, hingga pengusaha hasil pembudidayaan dan kelembagaan.
<b>PT.02</b>	<b>Layanan Kesehatan Hewan</b>	
02.01	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Hewan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan hewan mulai dari pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perlindungan hewan, pengelolaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan hingga, pengawasan obat hewan.
02.02	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen meliputi teknologi dan sarana pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, pengujian dan sertifikasi produk hewan, serta persetujuan pengeluaran/pemasukan.
<b>PT.03</b>	<b>Pengelolaan Perkebunan</b>	

03.01	Pengelolaan Tanaman Semusim	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan tanaman semusim mulai dari identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budi daya, hingga pemberdayaan dan pengelolaan kelembagaan.
03.02	Pengelolaan Tanaman Rempah & Penyegar	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan tanaman rempah dan penyegar mulai dari identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, hingga pemberdayaan dan pengelolaan kelembagaan.
03.03	Pengelolaan Tanaman Tahunan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan tanaman tahunan mulai dari identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, hingga pemberdayaan dan pengelolaan kelembagaan.
03.04	Perlindungan Perkebunan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan perkebunan mulai dari identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar, organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan serta perlindungan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
03.05	Pengelolaan Pascapanen dan Pembinaan Usaha	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pascapanen dan pembinaan usaha meliputi pengelolaan pascapanen tanaman semusim, rempah, dan penyegar, pascapanen tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan, serta pengelolaan gangguan usaha dan penanganan konflik.
<b>PT.04</b>	<b>Pengelolaan Hortikultura</b>	
04.01	Perlindungan hortikultura	Arsip yang berkaitan dengan perlindungan hortikultura meliputi perlindungan tanaman buah, perlindungan tanaman sayuran dan tanaman obat, perlindungan tanaman florikultura, serta pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis.
04.02	Perbenihan Hortikultura	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan hortikultura mulai dari penilaian varietas, pengawasan mutu benih, hingga budidaya dan pascapanen florikultura.
<b>PT.05</b>	<b>Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	



05.01	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan meliputi pengelolaan basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi, serta perluasan kawasan tanaman pangan termasuk kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
05.02	Pengelolaan Air Irigasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan air irigasi meliputi pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, pengelolaan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta identifikasi dan pengembangan kelembagaan.
05.03	Pembiayaan Pertanian	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan pertanian meliputi pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis.
05.04	Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.
05.05	Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	Arsip yang berkaitan dengan penggunaan alat dan mesin pertanian mulai dari pengembangan serta pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian, hingga pengembangan kelembagaan dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian.
<b>PT.06</b>	<b>Pembudidayaan Tanaman Pangan</b>	
06.01	Perbenihan Tanaman Pangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan tanaman pangan mulai dari penialian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serelia, produksi benih aneka kacang dan umbi, hingga pengembangan kelembagaan benih tanaman pangan.
06.02	Budidaya Serealia	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman serelia meliputi padi irigasi dan rawa, padi tanah hujan dan lahan kering, serta serelia lain.
06.03	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi meliputi kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi.

06.04	Perlindungan Tanaman Pangan	Arsip yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan meliputi pengelolaan data organisme pengganggu, pengelolaan dampak perubahan iklim, penggunaan teknologi pengendalian, serta pengelolaan pengendalian hama terpadu.
06.05	Pengelolaan Pascapanen Tanaman Pangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan meliputi padi, jagung dan serelia lain, kedelai dan aneka kacang serta aneka umbi.
<b>PT.07</b>	<b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</b>	
07.01	Pengolahan Hasil Pertanian	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
07.02	Mutu dan Standarisasi	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan mutu dan standarisasi hasil pertanian mulai dari penyusunan standarisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, hingga kerja sama dan harmonisasi.
07.03	Pengembangan Usaha dan Investasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha dan investasi hasil pertanian meliputi kemitraan dan kewirausahaan, investasi serta promosi hasil pertanian di dalam dan luar negeri.
07.04	Pemasaran Domestik	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran domestik hasil pertanian meliputi pengelolaan informasi pasar, pemantauan pasar dan stabilisasi harga, pengembangan sarana dan kelembagaan pasar serta pengembangan jaringan pemasaran.
<b>PT.08</b>	<b>Pengelolaan Ketahanan Pangan</b>	
08.01	Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi analisis ketersediaan pangan, analisis dan pengembangan akses pangan, serta analisis dan penanggulangan kerawanan pangan.

08.02	Pengelolaan Distribusi dan Cadangan Pangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan distribus dan cadangan pangan meliputi analisis dan pengelolaan kelembagaan distribusi pangan, analisis harga pangan produsen dan konsumen.
08.03	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan penganekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan meliputi pola dan kebutuhan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan, serta pengawasan keamanan dan kelembagaan pangan segar.
08.04	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan penguatan kelembagaan ketahanan pangan.
<b>PT.09</b>	<b>Karantina Pertanian</b>	
09.01	Pengelolaan Data Karantina	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data karantina hewan dan tumbuhan mulai dari ;pendataan penyakit hewan, penyusunan teknik dan metode pendataan, pendataan kualitatif dan kuantitatif, pendataan sarana/laboratorium/lokasi, sampai dengan pelaporan.
09.02	Inventarisasi Penyakit	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi penyakit hewan dan tumbuhan meliputi survei, determinasi penyakit/daerah pencar, dan pengamatan penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa.
09.03	Tindakan Karantina	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan tindakan karantina hewan dan tumbuhan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, serta pembebasan dari karantina.
09.04	Sertifikasi Pelepasan Karantina	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi pelepasan karantina hewan dan tumbuhan.
<del>09.06</del> / 09.05	Keamanan Pangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan asal tumbuhan.
<del>09.07</del> / 09.06	Pengawasan Tertib Operasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan tertib operasional karantia hewan dan tumbuhan.
<b>PT.10</b>	<b>Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian</b>	

10.01	Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perlindungan varietas tanaman mulai dari permohonan, pengujian, sampai dengan pendaftaran varietas Sumber Daya Genetik Tanaman.
10.02	Pelayanan Perizinan Pertanian	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perizinan pertanian bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan, serta bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak.
10.03	Pelayanan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian meliputi sertifikasi dan penyusunan pertimbangan hukum.
<b>PT.11</b>	<b>Bimbingan Teknis Pertanian</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis pertanian.
<b>PT.12</b>	<b>Penyuluhan Pertanian</b>	
12.01	Penyelenggaraan Penyuluhan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan meliputi penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan penyuluhan melalui sekolah lapang dan demonstrasi plot.
12.02	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan.
12.03	Pengelolaan Kelembagaan Penyuluhan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan penyuluhan meliputi pengelolaan database kelompok tani dan nelayan Indonesia, penyusunan rekomendasi dan kerja sama penyuluhan.
<b>PT.13</b>	<b>Pengawasan Usaha Pertanian</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan usaha pertanian meliputi monitoring usaha di bidang pertanian.
<b>PT.14</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian
<b>PK</b>	<b>PERIKANAN</b>	

<b>PK.01</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	
01.01	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Budidaya	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana budidaya perikanan meliputi pengelolaan lahan dan air, prasana dan sarana budidaya air tawar, serta minapolitan budidaya.
01.02	Perbenihan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan ikan mulai dari perbenihan induk, perbenihan skala kecil dan skala besar, penyusunan standarisasi dan sertifikasi, hingga pengelolaan informasi dan distribusi perbenihan.
01.03	Produksi Perikanan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan produksi perikanan mulai dari budidaya ikan air tawar, ikan hias, sertifikasi, hingga pengelolaan data produksi perikanan.
01.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan meliputi pengendalian hama dan penyakit ikan, perlindungan lingkungan budidaya, standarisasi kesehatan dan lingkungan, pengawasan obat ikan, serta pengendalian residu.
01.05	Usaha Budidaya	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan usaha budidaya perikanan mulai dari pengelolaan investasi dan permodalan, pembinaan kewirausahaan, pelayanan usaha, pengembangan kelembangaan hingga pengelolaan informasi dan promosi usaha budidaya perikanan.
<b>PK.02</b>	<b>Karantina Ikan</b>	

02.01	Tindak Karantina Ikan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan tindakan karantina ikan mulai dari pemeriksaan, penahanan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penolakan, pemusnahan hingga pelepasan/pembebasan ikan.
02.02	Tertib Operasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan tertib operasional budidaya perikanan mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan persetujuan/rekomendasi budidaya pemasukan/pengeluaran ikan, serta penyusunan persyaratan lalu lintas pemasukan dan pengeluaran.
02.03	Pencegahan Penyakit	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyakit meliputi penutupan area dan penentuan pelanggaran lalu-lintas ikan.
02.04	Pengawasan Karantina Ikan	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan karantina ikan meliputi pengawasan peraturan dan pelaksanaan operasional karantina.
02.05	Pengelolaan Instalasi Karantina	Arsip yang berkaitan dengan instalasi karantina ikan meliputi karantina di instalasi karantina sementara dan lokasi karantina.
<b>PK.03</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perikanan</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan meliputi pelaporan statistik bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan..
<b>PS</b>	<b>PERSANDIAN</b>	
<b>PS.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengendalian Persandian</b>	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian persandian meliputi: pembinaan dan pengendalian SDM persandian, pembinaan dan pengendalian Materiil dan Jaring Komunikasi Persandian,



		pembinaan dan pengendalian kreditasi dan sertifikasi.
01.01	Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Persandian	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian SDM persandian mulai dari pendataan personel sandi, pembinaan personel sandi, sampai dengan pengawasan dan pengendalian.
01.02	Pembinaan dan Pengendalian Materiil dan Jaring Komunikasi Persandian	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian materiil dan jaringan komunikasi persandian meliputi data materiil dan JKS, serta analisa kebutuhan materiil dan jaringan komunikasi sandi.
01.03	Akreditasi dan Sertifikasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pendidikan dan pelatihan persandian, serta sertifikasi alat sandi.
<b>PS.02</b>	<b>Pengamanan Persandian</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengamanan persandian meliputi pengamanan sinyal, analisis sinyal, materiil sinyal
02.01	Pengamanan Sinyal	Arsip yang berkaitan dengan pengamanan sinyal pada teknik sandi dan kriptografi mulai dari perencanaan, administrasi, sampai dengan pelaporan.
02.02	Analisis Sinyal	Arsip yang berkaitan dengan analisis sinyal pada teknik sandi dan kriptografi mulai dari perencanaan, administrasi, sampai dengan pelaporan.
02.03	Materil Sandi	Arsip yang berkaitan dengan pengamanan materiil sandi pada sistem dan peralatan sandi mulai dari perencanaan, administrasi, sampai dengan pelaporan.
<b>PS.03</b>	<b>Pengkajian Persandian</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian persandian pada Kriptografi, Peralatan Sandi, dan Komunikasi Sandi mulai dari perencanaan pengkajian, administrasi pengkajian, pelaksanaan pengkajian, hingga laporan pengkajian.
<b>ST</b>	<b>STATISTIK</b>	

<b>ST.01</b>	<b>Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi</b>	
01.01	Perencanaan	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan sensus meliputi master plan dan network planning, perumusan dan penyusunan bahan, serta penyusunan studi pendahuluan ( <i>desk study</i> ).
01.02	Persiapan	Arsip yang berkaitan dengan persiapan sensus mulai dari penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, kuesioner, konsep dan definisi, metodologi, buku pedoman, serta peta dan muatan peta wilayah kerja, sampai dengan sosialisasi, koordinasi, pelatihan, penyusunan program pengolahan, perancangan, serta uji coba kuesioner.
01.03	Pelaksanaan Lapangan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lapangan sensus mulai dari pelaksanaan listing, pemilahan sampel, pengumpulan data, pemeriksaan, pengawasan lapangan, sampai dengan monitoring kualitas.
01.04	Pengolahan	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan sensus mulai dari pengelolaan dokumen, pemeriksaan dokumen dan pengkodean, perekaman data, tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, sampai dengan pelaporan.
01.05	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Arsip yang berkaitan dengan analisis dan penyajian hasil sensus mulai dari pembahasan angka hasil pengolahan, penyusunan angka sementara, penyusunan angka tetap, pembahasan draf publikasi, analisis data, sampai dengan penyusunan publikasi.
01.06	Diseminasi hasil sensus	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi hasil sensus mulai dari penyusunan bahan untuk penyebaran informasi ke publik bentuk leaflet, booklet, website, CD dan sejenisnya, sampai dengan sosialisasi hasil survei melalui berbagai media serta layanan dan promosi statistik
<b>ST.02</b>	<b>Survei</b>	

02.01	Perencanaan	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan survei meliputi <i>master plan</i> dan <i>network planning</i> , perumusan dan penyusunan bahan, serta penyusunan studi pendahuluan ( <i>desk study</i> ).
02.02	Persiapan	Arsip yang berkaitan dengan persiapan survei mulai dari penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, kuesioner, konsep dan definisi, metodologi, buku pedoman pencacahan, pengawasan dan pengolahan, serta peta dan muatan peta wilayah kerja, pedoman sosialisasi, sampai dengan sosialisasi, koordinasi, pelatihan instruktur dan petugas, penyusunan program pengolahan, perancangan tabel, serta pelaksanaan uji coba kuesioner.
02.03	Pelaksanaan Lapangan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lapangan survei mulai dari pelaksanaan listing, pemilahan sampel, pengumpulan data, pemeriksaan, pengawasan lapangan, sampai dengan monitoring kualitas.
02.04	Pengolahan	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan survei mulai dari pengelolaan dokumen, pemeriksaan dokumen dan pengkodean, perekaman data, tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, sampai dengan pelaporan.
02.05	Analisis dan Penyajian Hasil Survei	Arsip yang berkaitan dengan analisis dan penyajian hasil survei mulai dari pembahasan angka hasil pengolahan, penyusunan angka sementara, penyusunan angka tetap, pembahasan draf publikasi, analisis data, sampai dengan penyusunan publikasi.
02.06	Diseminasi hasil Survei	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi hasil survei mulai dari penyusunan bahan untuk penyebaran informasi ke publik bentuk leaflet, booklet, website, CD dan sejenisnya, sampai dengan sosialisasi hasil survei melalui berbagai media.

ST.04	Konsolidasi Data Statistik	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan konsolidasi data statistik mulai dari kompilasi data, analisis data, sampai dengan penyusunan publikasi data statistik.
ST.05	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, serta Konsolidasi data Statistik	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan sensus, survei, serta konsolidasi data statistik.
BC	BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA	
BC.01	Pemetaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	
01.01.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi bencana, kecelakaan, dan kondisi bahaya mulai dari penyusunan rencana dan standarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana darat, laut, udara, serta peralatan pencarian dan pertolongan, hingga pengawakan dan perbekalan.
01.02	Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina ketenagaan dan pemsarakatan korban bencana, kecelakaan dan pertolongan mulai dari penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, sampai dengan pemsarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan.
BC.02	Operasi Pencarian dan Pertolongan	
02.01	Operasi dan Latihan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan operasi dan latihan pencarian dan pertolongan mulai dari perencanaan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, sampai dengan siaga dan latihan,

02.02	Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggara komunikasi pencarian dan pertolongan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan operasi komunikasi, sampai dengan inventarisasi dan pemeliharaan perangkat komunikasi.
<b>BC.03</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>	
03.01	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Arsip yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi kajian dan mitigasi resiko bencana, pemberdayaan masyarakat untuk persiapan bencana, sampai dengan kesiapsiagaan berupa peringatan dini, perencanaan siaga, dan penyiapan sumber daya.
03.02	Penanganan Darurat	Arsip yang berkaitan dengan penanganan kondisi darurat bencana meliputi tanggap darurat, pengurusan bantuan darurat, serta perbaikan darurat.
03.03	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi akibat bencana meliputi penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan sosial ekonomi, serta penanganan pengungsi.
03.04	Logistik dan Peralatan	Arsip yang berkaitan dengan penanganan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana meliputi inventarisasi kebutuhan dan pengadaan logistik, penyimpanan dan distribusi logistik, inventarisasi kebutuhan dan pengadaan peralatan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, serta pengerahan dan distribusi peralatan.
<b>BC.04</b>	<b>Pelaporan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan data bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya meliputi pelaporan statistik bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
<b>SO</b>	<b>SOSIAL</b>	
<b>SO.01</b>	<b>Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial</b>	

01.01	Kesejahteraan Sosial Anak	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak meliputi kesejahteraan sosial anak balita, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
01.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, tuna netra dan tuna rungu wicara, serta tuna mental meliputi rehabilitasi di dalam dan di luar panti, pengelolaan kelembagaan dan advokasi sosial, serta asistensi dan pemeliharaan sosial.
01.03	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial meliputi Gelandangan, pengemis dan pemulung, tuna susila dan korban trafficking perempuan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan human immunodeficiency virus dan acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) dan kelompok minoritas.
01.04	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang meliputi kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
01.05	Pelayanan sosial lanjut usia	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sosial bagi orang lanjut usia meliputi pelayanan di dalam dan di luar panti, pengembangan kelembagaan, serta advokasi dan pelayanan kedaruratan.
<b>SO.02</b>	<b>Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	
02.01	Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial meliputi kegiatan bimbingan dan standarisasi serta perizinan dan pengumpulan dana sosial.



02.02	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran meliputi pemulihan sosial, pemulangan dan registrasi, serta evaluasi dan pelaporan.
02.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial meliputi pembinaan ketahanan sosial masyarakat, tanggap darurat sosial, pemulihan sosial, serta kerja sama sosial baik dengan pemerintah maupun non pemerintah.
02.04	Perlindungan sosial korban bencana alam	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana alam meliputi pembinaan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat sosial, pemulihan dan penguatan sosial serta kerja sama sosial penanganan korban bencana alam baik dengan pemerintah maupun non pemerintah.
02.05	Pelayanan Jaminan sosial	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan jaminan sosial meliputi seleksi dan verifikasi, pengembangan kelembagaan asuransi kesejahteraan sosial, pemberian bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan serta kerja sama jaminan sosial baik dengan pemerintah maupun non pemerintah.
<b>SO.03</b>	<b>Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	
03.01	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial	Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial meliputi pembinaan ketahanan keluarga, asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan, pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, pembinaan kemitraan dunia usaha, serta pembinaan karang taruna.

03.02	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan komunitas adat terpencil meliputi persiapan pemberdayaan, pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan pengembangan potensi, pembinaan keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil, serta kerja sama kelembagaan.
03.03	Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan meliputi identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha, penataan sosial lingkungan rumah, serta advokasi dan pengembangan aksesibilitas.
03.04	Pelayanan Pemberian Gelar Kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan pemberian gelar kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial meliputi pemberian pengharagaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, pengembangan kesetiakawanan sosial serta, pengelolaan taman makam pahlawan di daerah.
SO.04	<b>Pelaporan Statistik Sosial</b>	Arsip yang berkaitan dengan pelaporan statistik pelayanan sosial meliputi pelaporan statistik bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
KS	<b>KESEHATAN</b>	
KS.01	<b>Penyelenggaraan Upaya Kesehatan</b>	
01.01	Upaya Kesehatan Dasar	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan antara lain kedokteran keluarga, praktik klinis dokter fasyankes primer, kesehatan gigi dan mulut, pencegahan infrksi menular dan penyakit mulut, pembiayaan dan penggunaan darah, unit dan jejaring pelayanan darah, upaya kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, dan kepulauan, serta pemilihan puskesmas berprestasi.

01.02	Upaya Kesehatan Rujukan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, serta perdagangan jasa.
01.03	Pengurusan Organisasi Kedokteran	Arsip yang berkaitan dengan pengurusan organisasi kedokteran meliputi pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK), serta badan pengawas di rumah sakit.
01.04	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan pasien dengan jaminan kesehatan.
01.06 / 01.05	Keperawatan dan Keteknisian Medik	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan dan keteknisian medis meliputi pelayanan keperawatan dasar, profesional di rumah sakit, pembinaan pelayanan kebidanan, serta pembinaan pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik.
01.07 / 01.06	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan meliputi pelayanan laboratorium mikrobiologi dan imunologi, pelayanan patologi dan toksikologi, pelayanan radiologi, perijinan dan sertifikasi pelayanan radiologi, serta penyelenggaraan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan, dan aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan.
01.08 / 01.07	Kesehatan Jiwa	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa meliputi layanan kesehatan jiwa dan non fasilitas, bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan, penanggulangan penelantaran penderita gangguan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah kecanduan narkoba, obat terlarang, alkohol, dan zat adiktif lainnya, serta pelayanan kesehatan jiwa kelompok berisiko.
KS.02	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	

02.01	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penyakit melalui kegiatan surveillans dan respon terhadap kejadian luar biasa di bidang kesehatan.
02.02	Imunisasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penyakit melalui kegiatan imunisasi meliputi penyelenggaraan imunisasi bagi bayi, balita, masyarakat umum, petugas kesehatan, wanita usia subur, dan masyarakat daerah sulit, <i>coldchain</i> bagi petugas imunisasi, Pekan Imunisasi Nasional, serta penyelenggaraan vaksin dan serum program imunisasi.
02.03	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penyakit melalui kegiatan karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan meliputi pemberian ICV, penghapusan serangga dan tikus, pengendalian resiko kesehatan lingkungan, kaksinasi meningitis, pengendalian kesehatan nahkoda/pilot dan ABK/Pesawat, pengendalian air bersi dan fumigasi kapal.
02.04	Pelayanan Kesehatan Matra	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui kegiatan pelayanan kesehatan matra antara lain program mudik sehat, pelayanan kesehatan penumpang, migran, penyelaman dan hyperbarik, penanggulangan kesehatan akibat gangguan kamtibmas, serta pelayanan kesehatan transmigrasi bagi tenaga kesehatan.
02.05	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian penyakit menular secara langsung meliputi pengendalian tuberkulosis, penyakit seksual, pernafasan akut, pencernaan, serta pengendalian kusta dan frambusia.
02.06	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang meliputi pengendalian malaria, arbovirolosi, zoonosis, filariasis dan kecacingan, serta pengendalian vektor.

02.07	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian penyakit tidak menular meliputi pengendalian penyakit darah, penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan generatif, serta pengendalian penyakit akibat tindak kekerasan.
02.08	Penyehatan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan upaya penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan, serta pengamanan limbah dan radiasi.
02.09	Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
<b>KS.03</b>	<b>Pengembangan teknologi dan layanan laboratorium</b>	
03.01	Pengembangan Teknologi Laboratorium	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan teknologi laboratorium melalui pengembangan model dan teknologi yang tepat guna, uji kendali mutu, dan kalibrasi serta pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan instalasi laboratorium.
03.02	Layanan Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan layanan sertifikasi sanitasi kesehatan dan pengujian kesehatan meliputi sertifikasi <i>ship sanitation</i> dan sertifikasi kesehatan kesehatan, sertifikasi vaksinasi internasional, sertifikasi air bersih, sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga dan rumah makan, surat keterangan pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat, serta rekomendasi hasil uji laboratorium.
<b>KS.04</b>	<b>Penyelenggaraan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak</b>	
04.01	Penanggulangan Masalah Gizi	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan masalah gizi meliputi gizi mikro, gizi makro, gizi klinik dan dietetik, konsumsi makan dan jasa makanan, serta kewaspadaan gizi.

04.02	Pelayanan Kesehatan Ibu	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu meliputi kesehatan kehamilan, kesehatan persalinan, keluarga berencana, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, serta perlindungan kesehatan reproduksi.
04.03	Pelayanan Kesehatan Anak	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan anak meliputi kelangsungan hidup bayi, balita dan anak usia sekolah, kewaspadaan penanganan balita beresiko, kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta perlindungan kesehatan anak.
<b>KS.05</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</b>	
05.01	Kesehatan Tradisional Keterampilan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional dengan keterampilan meliputi akupresure, asuhan mandiri kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes, dan pelayanan kesehatan tradisional keterampilan lainnya.
05.02	Kesehatan Tradisional Ramuan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan ramuan tradisional meliputi <i>health tourism</i> , peningkatan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA), pelayanan sehat pakai air (SPA), asuhan mandiri kesehatan tradisional, serta pelayanan kesehatan tradisional ramuan di fasyankes.
05.03	Kesehatan Alternatif dan Komplementer	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer meliputi akupuntur, obat herbal/obat tradisional, integrasi yankestrad, serta pelayanan alternatif komplementer lainnya.
05.04	Penapisan dan Kemitraan	Arsip yang berkaitan dengan penapisan dan kemitraan pengobatan tradisional meliputi sentra penerapan dan pengembangan tradisional (SP3T), kelompok kerja nasional dan penapisan pengobatan tradisional, alternatif, dan komplementer, serta pengobatan tradisional dan asosiasi pengobatan tradisional.
<b>KS.06</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	

06.01	Pelayanan Kesehatan Kerja	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja, pemeriksaan kesehatan pekerjaan dan pemeriksaan calon tenaga kerja Indonesia.
06.02	Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas kesehatan kerja meliputi penyelenggaraan gerakan pekerjaan perempuan sehat produktif, peningkatan kesehatan kerja, serta TP ASI.
06.03	Peningkatan Kesehatan di Lingkungan kerja	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kesehatan di lingkungan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja di KKP, peningkatan K3 perkantoran, rumah sakit dan puskesmas, serta biomonitoring efek kesehatan dan review pedoman pengendalian resiko kesehatan.
06.04	Penyelenggaraan Kemitraan kesehatan kerja	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kemitraan kesehatan kerja meliputi pengembangan jabfung pembimbing kesehatan kerja, kesehatan nelayan, integrasi pos UKK, penguatan profesi kesehatan, serta penyelenggaraan kemitraan kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota percontohan.
06.05	Peningkatan Kesehatan Perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kesehatan perkotaan meliputi peningkatan kesehatan kawasan kumuh dan miskin kabupaten dan kota, serta penyelenggaraan forum kota dalam rangka peningkatan kesehatan.
06.06	Layanan Kesehatan Olahraga	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan olahraga meliputi kegiatan kebugaran jasmani bagi karyawan/pekerja, bagi calon jemaah haji, dan bagi usia sekolah, olahraga bagi ibu hamil/masa nifas dan bagi usia lanjut, serta pelayanan kesehatan olahraga masyarakat.
<b>KS.07</b>	<b>Pengawasan Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>	

07.01	Pengawasan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan obat publik dan perbekalan kesehatan meliputi pengawasan harga obat publik, pengadaan obat, serta perbekalan kesehatan.
07.02	Pengawasan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan produksi dan distribusi alat kesehatan, obat, dan produk kesehatan rumah tangga.
07.03	Pengawasan Standarisasi, Klinis, Komunitas Farmasi, dan Obat Rasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan standarisasi layanan farmasi klinis, komunitas farmasi dan penggunaan obat rasional.
07.04	Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan produksi dan distribusi kefarmasian terhadap obat tradisional serta kosmetik dan bahan makanan.
07.04 / 07.05	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus.
07.05 / 07.06	Pengawasan Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan kemandirian obat dan bahan baku obat.
<b>KS.08</b>	<b>Akreditasi, Sertifikasi dan Perizinan Layanan Kesehatan</b>	
08.01	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C dan Penanam Modal Asing (PMA)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan proses perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas C dan penanaman modal asing mulai dari usulan penetapan atau peningkatan kelas dari pemilik RS atau pimpinan badan hukum rumah sakit, rekomendasi dinas kesehatan, profil dan data rumah sakit, <i>self instrument assessment</i> , keputusan penetapan kelas, serta pemberian sertifikat lulus akreditasi.
08.02	Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.

08.03	Sertifikasi dan Perizinan Alat Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi dan perizinan alat kesehatan meliputi sertifikasi produksi alat kesehatan, sertifikasi sarana distribusi alat kesehatan, sertifikasi produksi PKRT, surat keterangan PKRT, surat keterangan alat kesehatan, surat kesehatan <i>special access scheme</i> (SAS), perijinan dan pengawasan alat kesehatan, serta perijinan penyalur alat kesehatan.
<b>KS.09</b>	<b>Penanggulangan Krisis Kesehatan</b>	
09.01	Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi krisis kesehatan.
09.02	Tanggap Darurat dan Pemulihan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan tanggap darurat dan pemulihan krisis kesehatan.
09.03	Pemantauan dan Informasi	Arsip yang berkaitan dengan pemantauan dan layanan informasi penanggulangan krisis kesehatan.
09.04	Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan.
09.05	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi bencana.
<b>KS.10</b>	<b>Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan jaminan kesehatan nasional meliputi pendataan NHA tahunan dan pelaksanaan teknis penguatan pelaksanaan JKN.
<b>KS.11</b>	<b>Pengelolaan Intelegensia Kesehatan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensi kesehatan serta penanggulangan masalah intelegensi kesehatan.
<b>KS.12</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Haji</b>	
12.01	Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji meliputi pemeriksaan, pelayanan kesehatan, klai pelayanan kesehatan, serta rekrutmen panitia penyelenggara ibadah haji dan tenaga musiman.

12.02	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji meliputi advokasi dan kemitraan pembinaan kesehatan, kesehatan haji di kabupaten/kota, kesehatan haji terpadu, pemeriksaan jasa boga catering jemaah haji, sanitasi asrama haji, serta penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia.
<b>KS.13</b>	<b>Pengembangan Promosi dan Kemitraan Kesehatan</b>	
13.01	Pengembangan Sarana Promosi Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sarana promosi kesehatan melalui media publikasi, perlombaan, dan seminar.
13.02	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan pesan promosi kesehatan untuk masyarakat.
13.03	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran di bidang kesehatan.
13.04	Penyelenggaraan Peringatan Hari kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan hari kesehatan.
<b>KI</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
<b>KI.01</b>	<b>Perencanaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana teknologi, informasi dan komunikasi mulai dari pengkajian, pengusulan, penyiapan, perumusan, pemberian masukan dan dukungan, sampai pada penetapan kebijakan.
<b>KI.02</b>	<b>Manual/Standar Teknologi, Informasi dan Komunikasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan manual/standar teknologi, informasi, dan komunikasi meliputi manual teknik telekomunikasi, manual teknik komunikasi radio, manual penerapan standar telekomunikasi, manual kualitas pelayanan dan harmonisasi standar, serta manual audit perangkat lunak.

<b>KI.03</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>	
<b>03.01</b>	Rencana Penataan Sumber Daya	Arsip yang berkaitan dengan rencana penataan sumber daya meliputi peta alokasi spektrum dinas, peta alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat, serta hasil analisa ekonomi sumber daya.
<b>03.02</b>	Operasi Sumber Daya	Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya meliputi pelayanan spektrum dinas, pelayanan spektrum non dinas, sertifikasi operator radio, penanganan biaya, serta konsultasi dan data operator sumber daya
<b>03.03</b>	Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Informatika	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang meliputi pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum, serta monitoring dan penertiban.
<b>KI.04</b>	<b>Penyelenggaraan Informatika</b>	
<b>04.01</b>	Layanan Telekomunikasi	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan telekomunikasi meliputi layanan jaringan telekomunikasi, layanan jasa telekomunikasi, penomoran telekomunikasi dan informatika, tarif dan interkoneksi, serta kelayakan sistem telekomunikasi.
<b>04.02</b>	Penyiaran	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran meliputi pemetaan dan database, verifikasi dan uji coba siaran, radio, televisi dan iklim usaha penyiaran
<b>04.03</b>	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal meliputi telekomunikasi khusus pemerintah, telekomunikasi khusus non pemerintah, layanan khusus penyiaran, pelayanan kewajiban universal, serta pengembangan infrastruktur.

04.04	Pengendalian Informatika	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian informatika meliputi monitoring dan evaluasi jaringan dan jasa telekomunikasi, monitoring dan evaluasi penyiaran, serta pencegahan dan penertiban.
<b>KI.05</b>	<b>Pengembangan Aplikasi Informatika dan Pemberdayaan Informatika</b>	
05.01	Pengembangan <i>e-Government</i>	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan <i>e-government</i> mencakup program dan evaluasi tata kelola <i>e-government</i> , pengembangan teknologi dan infrastruktur <i>e-government</i> , interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-government</i> , aplikasi layanan pemerintahan daerah, serta pengembangan aplikasi layanan publik.
05.02	Pengembangan <i>e-Business</i>	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan <i>e-business</i> yang mencakup kegiatan tata kelola <i>e-business</i> , teknologi dan infrastruktur <i>e-business</i> , interoperabilitas dan interkoneksi <i>e-business</i> serta aplikasi layanan <i>e-business</i> .
05.03	Pemberdayaan Informatika	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika yang meliputi kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan, pedesaan, perbatasan dan pulau terluar, serta pemberdayaan informatika masyarakat khusus.
05.04	Pemberdayaan Industri Informatika	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan industri informatika meliputi industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, serta industri konten multimedia.
<b>KI.06</b>	<b>Pengelolaan Keamanan Informasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan keamanan informasi meliputi kegiatan tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi, monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi, penyidikan dan penindakan kejahatan informasi ( <i>ciber crime</i> ), serta sosialisasi budaya keamanan informasi.

<b>KI.07</b>	<b>Penyelenggaraan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	
07.01	Komunikasi Publik	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik meliputi kegiatan tata kelola komunikasi publik, pengolahan opini publik, dan layanan komunikasi publik
07.02	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan penyediaan informasi meliputi informasi politik, hukum dan keamanan, informasi perekonomian, serta informasi kesejahteraan rakyat.
07.03	Pengelolaan Media Publik	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan media publik meliputi media cetak, media online, serta media luar ruang dan audio visual.
07.04	Kemitraan Komunikasi	Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi meliputi program serta monitoring dan evaluasi kemitraan pemerintah dan lembaga negara, kemitraan media dan dunia usaha, serta kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi.
07.05	Layanan Informasi Internasional	Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi internasional, mencakup program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi media asing, perwakilan negara asing dan lembaga internasional, serta layanan informasi masyarakat luar negeri.
<b>KI.08</b>	<b>Pengelolaan Data dan Sarana Informasi</b>	
08.01	Pengelolaan Infrastruktur Informatika	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur informatika meliputi jaringan, piranti teknologi informatika, dan keamanan informatika.

08.02	Pengelolaan Sistem dan Data	Arsip yang berkaitan dengan sistem dan data mencakup portal dan konten, pengumpulan dan pengolahan data, serta pengembangan aplikasi.
08.03	Pengelolaan Informasi dan Hubungan Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pusat informasi dan hubungan masyarakat yang meliputi kegiatan pelayanan informasi, hubungan masyarakat, serta bimbingan teknis dan evaluasi.
<b>KI.09</b>	Penyusunan Laporan Statistik Komunikasi dan Informatika	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan laporan statistik komunikasi dan informatika meliputi laporan statistik bulanan, triwulanan, semesteran, serta laporan statistik tahunan.
<b>PH</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	
<b>PH.01</b>	<b>Pengelolaan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan</b>	
01.01	Pengelolaan Jaringan Transportasi Jalan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan jaringan transportasi jalan meliputi pengelolaan jaringan prasarana dan pelayanan dan pengembangan transportasi jalan.
01.02	Pengelolaan Sarana Angkutan Jalan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sarana angkutan jalan meliputi pengujian kendaraan bermotor dan teknologi kendaraan bermotor.
01.03	Pengelolaan Lalu-lintas jalan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan lalu-lintas jalan meliputi analisa dampak, manajemen dan rekayasa lalu-lintas, serta pengelolaan perlengkapan jalan.
01.04	Pengelolaan Angkutan Jalan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan angkutan jalan meliputi pengelolaan angkutan penumpang dan angkutan barang.

01.05	Pengendalian Operasional Lalu-Lintas dan Angkutan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian operasional lalu-lintas dan angkutan meliputi monitoring operasional lalu-lintas dan bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
<b>PH.02</b>	<b>Bina Sistem Transportasi Perkotaan</b>	
02.01	Bina Jaringan Transportasi Perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan jaringan transportasi perkotaan meliputi transportasi perkotaan berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan, transportasi perkotaan untuk kawasan lebih dari satu wilayah administrasi kota/kabupaten/provinsi, serta sistem informasi manajemen jaringan transportasi perkotaan.
02.02	Bina Lalu-Lintas Perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan lalu-lintas meliputi manajemen dan rekayasa lalu-lintas perkotaan dan lalu-lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, serta penanganan lalu-lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah.
02.03	Bina Angkutan Perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan angkutan perkotaan meliputi angkutan perkotaan dalam trayek, jaringan trayek, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan.
02.04	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemaduan moda transportasi perkotaan meliputi angkutan perkotaan tidak dalam trayek, transportasi antar simpul, serta penentuan dan pemenuhan alokasi angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya tidak dalam trayek.
02.05	Pengelolaan Dampak Transportasi Perkotaan :	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dampak transportasi perkotaan meliputi penyelenggaraan dan penanganan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, <i>masterplan</i> pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, analisis dampak lalu-lintas, serta <i>masterplan</i> transportasi perkotaan.

<b>PH.03</b>	<b>Pengelolaan Keselamatan Transportasi Darat</b>	
03.01	Manajemen Keselamatan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan manajemen keselamatan transportasi darat meliputi monitoring dan evaluasi data kecelakaan, kualifikasi unit pengkajian, pengembangan sistem manajemen keselamatan lalu-lintas dan angkutan, serta pengembangan keselamatan transportasi darat.
03.02	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan promosi keselamatan lalu-lintas dan angkutan, serta kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu-lintas dan angkutan.
03.03	Bina Keselamatan Angkutan Umum	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan keselamatan perusahaan dan awak angkutan umum.
03.04	Audit dan Inspeksi Keselamatan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat.
<b>PH.04</b>	<b>Pengelolaan Lalu-Lintas Antarkota dan Perkotaan</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan lalu-lintas antarkota dan lalu-lintas perkotaan.
<b>PH.05</b>	<b>Pengelolaan Angkutan Antarkota dan Perkotaan</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan antarkota dan angkutan perkotaan.
<b>PH.06</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan</b>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan meliputi pelaporan bulanan, triwulanan, sesemteran, serta tahunan.
<b>LH</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
<b>LH.01</b>	<b>Pengelolaan Tata Lingkungan</b>	

01.01	Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup mulai dari Inventarisasi, penerapan ekoregion, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sampai dengan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam.
01.02	Penerapan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan implementasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi evaluasi penerapan kebijakan dan perencanaan lingkungan hidup.
01.03	Pengelolaan Ekonomi Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan ekonomi lingkungan meliputi valuasi ekonomi dan internalisasi lingkungan serta penyusunan insentif dan pendanaan lingkungan.
01.04	Analisa Dampak Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan analisa dampak lingkungan meliputi kegiatan bimtek, penerapan sistem kajian, serta evaluasi dan tindak lanjut atas hasil analisa dampak lingkungan.
<b>LH.02</b>	<b>Pengendalian Pencemaran Lingkungan</b>	
02.01	Pemantauan dan Pengawasan	Arsip yang berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan oleh industri manufaktur, pertambangan, energi, minyak dan gas, pencemaran lingkungan oleh agro industri dan usaha skala kecil, serta pencemaran udara oleh transportasi.
02.02	Evaluasi dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan pengendalian pencemaran lingkungan oleh industri manufaktur, pertambangan, energi, minyak dan gas, pencemaran lingkungan oleh agro industri dan usaha skala kecil, serta pencemaran udara oleh transportasi..
02.03	Penyusunan laporan Implementasi Kajian Dampak Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan laporan implementasi kajian dampak lingkungan.

<b>LH.03</b>	<b>Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim</b>	
03.01	Pengendalian Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan meliputi pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya genetik, serta pengendalian keamanan hayati dan pengendalian kerusakan lahan.
03.02	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat meliputi pengendalian ekosistem, pengendalian danau, dan pengendalian rawa.
03.03	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer meliputi pengelolaan perangkat mitigasi, inventarisasi emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak ozon, serta pengendalian kerusakan iklim.
03.04	Pengelolaan Adaptasi Perubahan Iklim	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan adaptasi perubahan iklim meliputi pengelolaan perangkat adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan kerentanan perubahan iklim.
<b>LH.04</b>	<b>Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah</b>	
04.01	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun mulai dari registrasi dan notifikasi, pemantauan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut.
04.02	Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Arsip yang berkaitan dengan verifikasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mulai dari pengumpulan dan pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan, penimbunan dan dumping, serta notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas.

04.03	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi.
04.04	Pengelolaan Sampah	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sampah mulai dari pembatasan sampah, daur ulang dan pemanfaatan sampah, pembentukan dewan adipura hingga penetapan pemenang adipura.
<b>LH.05</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Cara Hukum Lingkungan</b>	
05.01	Hukum Administrasi Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum administrasi lingkungan meliputi pengelolaan dan pengembangan pengaduan serta penataan hukum administrasi lingkungan.
05.02	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
05.03	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan meliputi penyidikan, koordinasi penuntutan, evaluasi dan tindak lanjut, serta koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
<b>LH.06</b>	<b>Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	
06.01	Komunikasi Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan komunikasi dan publikasi tentang lingkungan meliputi pengembangan komunikasi serta penerbitan publikasi dan kampanye.
06.02	Penguatan Inisiatif Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penguatan inisiatif masyarakat tentang lingkungan hidup meliputi pengembangan dan bimbingan komunitas pendidikan lingkungan, serta inventarisasi dan revitalisasi kearifan lingkungan.

06.03	Peningkatan Peran Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan peningkatan peran serta masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan hidup meliputi peran masyarakat perkotaan dan pedesaan.
06.04	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	Arsip yang berkaitan dengan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan terhadap penyelamatan lingkungan hidup meliputi organisasi sosial dan masyarakat, serta organisasi profesi dan dunia.
<b>LH.07</b>	<b>Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas</b>	
07.01	Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi lingkungan meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan perangkat lunak, pengembangan sistem dan jaringan.
07.02	Pengelolaan Kelembagaan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan lingkungan meliputi pengembangan kelembagaan dan tata laksana lingkungan serta fasilitasi standar pelayanan minimal daerah kabupaten/kota.
07.03	Penyusunan Standarisasi dan Teknologi	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan standarisasi dan teknologi lingkungan meliputi standarisasi manajemen dan pengujian, kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan, serta teknologi ramah lingkungan.
07.04	Pengelolaan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan pusat sarana pengendalian dampak lingkungan meliputi pemantauan dan kajian kualitas lingkungan serta pengelolaan laboratorium rujukan dan pengujian.
<b>LH.08</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup</b>	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup meliputi pelaporan bulanan, triwulanan, semesteran, serta tahunan.
<b>PU</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
<b>PU.01</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	

01.01	Bina Penatagunaan Sumber Daya Air	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Penatagunaan sumber daya air meliputi perencanaan wilayah sungai, pengaturan dan pemantauan penggunaan sumber daya air, Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, serta pengelolaan hidrologi dan lingkungan sumber daya air.
01.02	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan jaringan sumber daya air meliputi perencanaan, pengelolaan keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, serta pengembangan dan pengelolaan informasi dan daya sumber daya air.
01.03	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sungai dan pantai meliputi pembinaan pengendalian konstruksi, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, perencanaan sungai dan pantai, pengelolaan drainase utama perkotaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
01.04	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan rawa meliputi pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
01.05	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ dan Embung	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung meliputi pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air, penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ dan embung dan konservasi fisik sumber daya air, kerja sama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan, inventarisasi, registrasi, dan klasifikasi bahaya, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

01.06	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah dan air baku meliputi pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku meliputi pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air, penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
01.06 / 01.07	Bina Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai meliputi pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa, operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau serta fasilitasi, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air.
<b>PU.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Jalan</b>	
02.01	Pengembangan Jaringan Jalan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan jaringan jalan meliputi perencanaan dan sistem jaringan, penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, pengembangan aplikasi manajemen jalan, pengelolaan lingkungan dan keselamatan jalan serta pemantauan dan evaluasi.
02.02	Pembangunan Jalan	Arsip yang berkaitan dengan pembangunan jalan meliputi manajemen konstruksi, pembinaan geometrik, perkerasan dan drainase, pembinaan geoteknik dan manajemen lereng, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan jalan.
02.03	Preservasi Jalan	Arsip yang berkaitan dengan preservasi jalan meliputi perencanaan dan penyusunan program, pembinaan teknik rekonstruksi dan berkala jalan, pembinaan teknik pemeliharaan rutin jalan, serta pemantauan dan evaluasi.
02.04	Pengelolaan Jembatan	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan jembatan meliputi perencanaan dan penyusunan program, pembinaan teknik jembatan, pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus, serta pemantauan dan evaluasi.

02.05	Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitas jalan daerah meliputi manajemen dan evaluasi jalan daerah, bimbingan teknik jalan daerah, pengendalian pelaksanaan jalan daerah, pengembangan jalan metropolitan dan kota besar, pengelolaan jalan bebas hambatan, serta pengadaan tanah untuk jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitas jalan daerah.
02.06	Pengaturan Jalan Tol	Arsip yang berkaitan dengan pengaturan jalan tol meliputi persiapan perusahaan jalan tol, pengadaan investasi jalan tol, pengambilalihan hak perusahaan jalan tol, serta pemantauan dan evaluasi.
<b>PU.03</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Infrastruktur</b>	
03.01	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keterpaduan infrastruktur permukiman meliputi keterpaduan perencanaan dan kemitraan, keterpaduan pembiayaan, keterpaduan pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi infrastruktur permukiman serta pemantauan dan evaluasi
03.02	Pengembangan Kawasan Permukiman	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan kawasan permukiman meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, standarisasi pengembangan kawasan, serta pemantauan dan evaluasi.
03.03	Bina Penataan Bangunan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penataan bangunan meliputi perencanaan teknis, penataan bangunan gedung umum dan gedung negara, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta standarisasi dan kelembagaan penataan bangunan.
03.04	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi perencanaan teknis, pembangunan sistem penyediaan air minum, pembinaan standarisasi dan kelembagaan sistem penyediaan air, fasilitas dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun, serta pengolahan sistem penyediaan air minum



		dan pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum.
<b>KK</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	
<b>KK.01</b>	<b>Pembinaan Profesi dan Pengamanan</b>	
01.01	Pengamanan Internal	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan pengamanan internal meliputi pembinaan pengamanan, penelitian personil, dan dokumentasi pengamanan.
01.02	Pembinaan Profesi	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan profesi pengamanan meliputi standarisasi, pembinaan etika, dan penegakan etika.
<b>KK.02</b>	<b>Pembinaan Pemelihara Keamanan</b>	
02.01	Pembinaan Penertiban Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penertiban masyarakat meliputi pembinaan pemuda, anak dan wanita, penertiban sosial, serta koordinasi dan rehabilitasi.
02.02	Pembinaan Keamanan Swakarsa	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan keamanan swakarsa meliputi pembinaan satuan pengamanan, pengawasan jasa pengamanan, serta manajemen pengamanan.
02.03	Pembinaan Perpolisian Masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan perpolisian masyarakat meliputi pembinaan kemampuan, pembinaan potensi masyarakat, serta pembinaan sistem keamanan lingkungan.

02.04	Pembinaan Polisi Khusus	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan polisi khusus meliputi pembinaan dan pelatihan, koordinasi dan pengawasan, serta analisi dan evaluasi.
02.05	Pemeliharaan ketertiban umum	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum meliputi tindak pidana ringan, tindak pidana tempat pertama kejadian perkara, serta pengamanan tenaga kerja Indonesia.
02.06	Pengendalian masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian masyarakat meliputi negosiasi dan pembinaan pengendalian masyarakat.
02.07	Patroli dan pengawalan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan patroli dan pengawalan keamanan meliputi patroli, pengawalan, <i>call centre 110</i> , dan <i>police backbone</i> .
02.08	Pengamanan Obyek Vital	Arsip yang berkaitan dengan pengamanan obyek vital meliputi pengamanan VVIP/VIP, pengamanan pariwisata, pengamanan obyek vital nasional, serta uadit sistem pengamanan obyek.
<b>KK.03</b>	<b>Penanggulangan Kejahatan Terorisme</b>	
03.01	Intelijen	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan intelijen penanggulangan kejahatan terorisme meliputi analisa terhadap lapangan dan penilaian informasi serta pendeteksian kejahatan terorisme.
03.02	Pencegahan	Arsip yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan terorisme melalui pembinaan dan penyuluhan.
<b>KK.04</b>	<b>Intelijen keamanan</b>	Arsip yang berkaitan dengan operasi intelijen kemanan terhadap kegiatan masyarakat dan orang asing.

KK.05	Pengelolaan Komunitas Intelelejen daerah (Kominda)	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan komunitas intelijen daerah meliputi pengelolaan data dan kegiatan fasiltasi komunitas.
LB	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
LB.01	<b>Penelitian dan Pengkajian</b>	
01.01	Penyusunan Rencana Kerja	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana kerja penelitian dan pengkajian, meliputi <i>master plan</i> /rencana strategis, rencana kerja tahunan, berkas kerja sama, serta berkas perijinan penelitian.
01.02	Administrasi Penelitian	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan administrasi penelitian, meliputi surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survei, penggunaan peralatan (alat dan bahan ), dan lain-lain.
01.03	Pelaksanaan Penelitian/Pengkajian	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian/pengkajian meliputi prosedur, data primer, <i>log book</i> , hasil studi kelayakan, instrumen penelitian, hasil pelaksanaan survei, laporan hasil pendataan/pengolahan data/hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi, laporan hasil penelitian dan hasil luaran, serta hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan.
LB.02	<b>Pengembangan dan Inovasi</b>	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan inovasi, mulai dari penyusunan rencana kerja, administrasi, pelaksanaan, serta hasil pengembangan dan inovasi.
LB.03	<b>Pemanfaatan dan Pendayagunaan Hasil Penelitian</b>	Arsip yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pendayagunaan hasil penelitian, meliputi penerapan, replikasi, prototipe hasil penelitian, serta perekayasaan pengembangan inovasi

LB.04	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan inovasi.
LB.05	Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi promosi dan pemasyarakatan.
LB.06	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
LB.07	Pengelolaan Jaringan Sistem Penelitian dan Pengembangan Nasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan jaringan sistem nasional terkait penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
LB.08	Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
LB.09	Pengelolaan <i>Master Proceeding</i> /Jurnal Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan <i>Master proceeding</i> /jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi penerbitan, <i>leaflet</i> dan <i>booklet</i> , serta kamus istilah.
LB.10	Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

LB.11	Forum komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan keikutsertaan dalam forum komunikasi penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
LB.12	LayananJasaPenelGandanPengembangan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Layanan jasa penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi jasa laboratorium pengujian, jasa teknologi produksi, jasa studi, jasa penyewaan peralatan, jasa tenaga ahli/profesi, jasa sertifikasi/kalibrasi, dan buku rekaman barang yg di uji/dikalibrasi
LB.13	Sertifikasi Peneliti	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi personil penelitian.
LB.14	Akreditasi Laboratorium	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi laboratorium penelitian.

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 Pada tanggal 7 Desember 2020  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 117